HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
28 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

JUMAT, 6 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

Skandal Penyadapan, Pengamat: Ada Indikasi Kudeta dari Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 6 Nov, 11.21 WIB



Wakil Presiden Ilegal, Yang terhormat Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, membuka persoalan serius tentang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan instrumen intelijen untuk kepentingan Politik dan perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan.

Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH.

Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur hukum yang semestinya.

Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.

Dugaan praktik tersebut berlangsung dalam kurun 2025–2026.

Persoalan semakin serius karena muncul dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga diakses tanpa verifikasi dan dokumen permohonan penyidikan yang sah.

Bahkan, terdapat dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan.

Jika terbukti, perkara ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan teknologi intelijen dan pertanggungjawaban aparat.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 21
Aneka Berita 25

ACEH

Pascainsiden di Pidie, Kapolda Aceh Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi



BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengimbau masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Pidie, agar tetap tenang, menahan diri, dan tidak mudah terpancing emosi menyikapi insiden yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang berkembang.

Selengkapnya di halaman 21 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Satgas PKH Usut Jaringan Tambang Nikel Arif Kurniawan yang Diduga Dibekingi Listyo Sigit



BANDA ACEH – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara resmi menargetkan jaringan perusahaan tambang nikel yang terafiliasi dengan pengusaha berinisial AK, yang dikenal sebagai "Raja Nikel".

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Duit Rp2 M dari Dirut KAI Bobby Diduga Mengalir dari Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina



BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018–2023.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Krisis Bank Digital Guncang Paraguay, Jutaan Warga Tak Bisa Tarik Uang



ASUNCIÓN – Paraguay diguncang krisis perbankan serius setelah Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan digital terbesar di negara Amerika Selatan tersebut, dihentikan operasionalnya oleh Bank Sentral Paraguay.

Keputusan itu membuat jutaan nasabah kehilangan akses sementara terhadap tabungan mereka, memicu kepanikan, antrean panjang di kantor bank, hingga demonstrasi yang …

Selengkapnya di halaman 25 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

45 BERITA

NASIONAL

Skandal Penyadapan, Pengamat: Ada Indikasi Kudeta dari Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 6 Nov, 11.21 WIB



Wakil Presiden Ilegal, Yang terhormat Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, membuka persoalan serius tentang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan instrumen intelijen untuk kepentingan Politik dan perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan.

Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH.

Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur hukum yang semestinya.

Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.

Dugaan praktik tersebut berlangsung dalam kurun 2025–2026.

Persoalan semakin serius karena muncul dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga diakses tanpa verifikasi dan dokumen permohonan penyidikan yang sah.

Bahkan, terdapat dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan.

Jika terbukti, perkara ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan teknologi intelijen dan pertanggungjawaban aparat.

Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai kasus tersebut perlu dibaca lebih luas dari sekadar pelanggaran internal kepolisian.

Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting negara harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penggunaan instrumen pengawasan negara.

Ia juga menyoroti munculnya indikasi agenda politik tersembunyi yang berpotensi mengarah pada upaya menggoyang posisi strategis dalam konfigurasi kekuasaan Presiden Prabowo.

”Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa nama Gibran tidak disebut dalam keterangan mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.” katanya Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, Kamis (5/11/2026).

”Ketika Presiden, sejumlah pejabat, dan tokoh politik lainnya masuk dalam lingkup perkara, tidak adanya penjelasan mengenai posisi Wakil Presiden justru menimbulkan tanda tanya. Apakah Gibran memang tidak menjadi target, atau ada informasi lain yang belum diungkap kepada publik? Misalnya, ada agenda kudeta dari Wapres Gibran, ” kata Ahmad Fadli.

Situasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya agenda senyap untuk melemahkan posisi presiden, bahkan skenario politik terburuk yang berujung pada perubahan konfigurasi kepemimpinan nasional.

Istilah kudeta yang kemungkinan sedang dimainkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pun menjadi pertanyaan yang patut diuji melalui penyelidikan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Satgas PKH Usut Jaringan Tambang Nikel Arif Kurniawan yang Diduga Dibekingi Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 6 Nov, 22.53 WIB



BANDA ACEH – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara resmi menargetkan jaringan perusahaan tambang nikel yang terafiliasi dengan pengusaha berinisial AK, yang dikenal sebagai “Raja Nikel”. Langkah ini dilakukan setelah indikasi kuat penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan keputusan tersebut usai rapat pimpinan yang digelar pada Rabu malam, 4 November 2026, di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung. Rapat dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK,” ujar Barita.

Satgas PKH telah menyelesaikan tahap penelaahan dan verifikasi awal. Hasilnya menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam tata kelola perizinan pertambangan serta pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin sah. Tim juga sedang mengidentifikasi seluruh korporasi yang memiliki hubungan hukum dengan AK dan mendalami dugaan keterkaitan dengan oknum aparat penegak hukum.

Siapa AK?

Berdasarkan konfirmasi Barita Simanjuntak dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, inisial AK merujuk pada Arif Kurniawan. Pengusaha yang sebelumnya relatif tertutup ini belakangan dikenal luas setelah laporan investigasi Bloomberg pada akhir Desember 2025 menyebutnya sebagai salah satu pengendali perdagangan bijih nikel domestik terbesar di Indonesia melalui jaringan PT Dua Delapan Resources (28 Resources) dan mitranya.

Menurut laporan tersebut, jaringan bisnis Arif diperkirakan menguasai sekitar sepertiga perdagangan bijih nikel domestik, dengan kepentingan di lebih dari 20 konsesi yang luasnya mencapai lebih dari 71.000 hektare, tersebar di sejumlah sentra nikel, termasuk Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Dugaan Bekingan Jenderal

Sejumlah media melaporkan bahwa Arif Kurniawan diduga mendapat perlindungan (bekingan) dari mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Dugaan ini mengemuka di tengah status Listyo yang baru ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Satgas PKH sendiri belum secara resmi menyebut nama Listyo Sigit. Namun, Barita Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami seluruh hubungan hukum korporasi terkait AK, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat, setelah pertanyaan wartawan soal kemungkinan bekingan jenderal polisi bintang empat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sakit Stroke, Alasan Polisi Tidak Tahan Slamet Uliandi

Oleh Redaksi · 5 Nov, 22.04 WIB

BANDA ACEH - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap purnawirawan Polri Slamet Uliandi (SU), meski telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian berdasarkan pertimbangan terkait kondisi kesehatan tersangka yang memburuk pasca-mengalami serangan stroke.

"Tersangka SU saat ini belum dilakukan penahanan oleh penyidik karena pertimbangan kondisi kesehatan yang bersangkutan yang sedang mengalami sakit pasca-stroke dan memerlukan perawatan medis secara intensif," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Suhermanto, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (5/11).

Kondisi penanganan SU ini berbeda dengan tiga tersangka lain dalam skandal yang sama, yakni EH, AS, dan satu perwira lainnya, yang saat ini seluruhnya telah mendekam di rumah tahanan Mako Brimob.

Meski tidak ditahan, Bareskrim Polri memastikan proses hukum terhadap mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri periode 2010–2019 tersebut tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Meskipun dilakukan penangguhan penahanan karena alasan medis, kami tegaskan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap saudara SU tetap berjalan secara transparan, profesional, dan objektif," ujar dia

Dalam konstruksi perkara, SU yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dinilai memiliki peran krusial sebagai pihak yang memberikan izin dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jadi Tersangka, Slamet Ulijandi Beri Izin Penghapusan Berkas Kasus Penyadapan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 21.59 WIB

BANDA ACEH - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan SU sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. SU diduga berperan memberikan izin menghapus berkas penyadapan."Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gerindra: Mau Geng Solo, Geng Oslo, Hukum Ya Hukum!

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.44 WIB

BANDA ACEH -Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ketua sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meyakini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak akan setengah-setengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.Habiburokhman yakin betul di bawah komando Jenderal Suyudi, Polri akan mampu menuntaskan perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Publik menduga Geng Solo atau kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ada di balik peristiwa ini. Habiburokhman menegaskan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu.

"Mau Geng Solo, Geng Oslo, hukum ya hukum," tegas Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Duit Rp2 M dari Dirut KAI Bobby Diduga Mengalir dari Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.25 WIB



BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018–2023.

KPK menegaskan, penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara yang terjadi sebelum Bobby menjabat sebagai Dirut PT KAI.

Uang yang disita itu diduga berasal dari salah satu tersangka dalam perkara pengadaan perangkat electronic data capture (EDC) dan automatic tank gauge (ATG) di SPBU. Penyitaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana dalam proyek digitalisasi SPBU yang tengah dibongkar KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan penyitaan terhadap Bobby tidak berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pimpinan perusahaan transportasi pelat merah tersebut. Perkara yang diusut terjadi pada 2018–2023, sedangkan surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan pada 2024.

“Jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama, 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Budi mengungkapkan, penyidik telah menyita uang milik Bobby sejak Agustus 2025. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara kooperatif setelah Bobby mengetahui adanya dugaan keterkaitan dana dengan perkara korupsi digitalisasi SPBU.

KPK menyebut penyitaan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran aliran dana pengadaan EDC dan ATG yang digunakan untuk mendukung digitalisasi SPBU.

“Sehingga artinya, uang yang disita dari Saudara BR ini membantu dalam proses pengungkapan perkara berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU, yang secara umum berkaitan dengan pengadaan EDC ataupun mesin ATG,” ujar Budi.

KPK juga mengungkap dugaan sumber uang yang disita dari Bobby. Dana tersebut diduga diberikan oleh salah satu tersangka yang terlibat dalam pelaksanaan proyek digitalisasi SPBU. Namun, Budi menegaskan Bobby bukan pihak yang bertindak sebagai penyedia barang maupun jasa dalam proyek tersebut.

“Ini diduga diberikan oleh salah satu tersangka dalam perkara ini yang kemudian mengerjakan proyek di digitalisasi SPBU. Sedangkan Saudara BR ini tidak atau bukan menjadi penyedia barang dan jasa dalam perkara ini,” tutur Budi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang sekitar Rp2 miliar yang disita KPK diduga bersumber dari Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi …

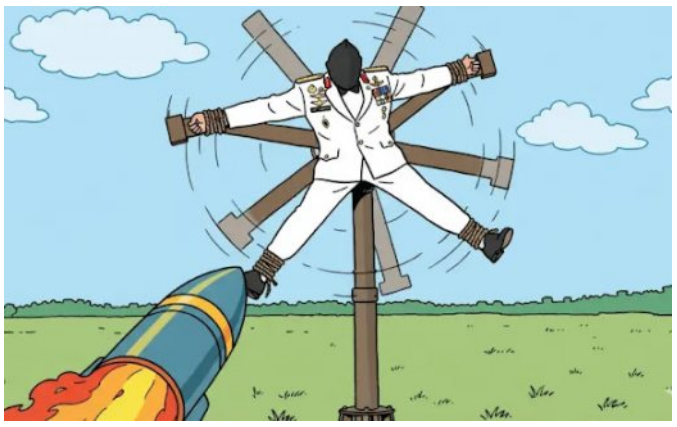
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Menakar Hukuman untuk Listyo Sigit, Pakar: Di Luar Negeri, Pengkhianat Dihukum Mati

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.19 WIB



BANDA ACEH - Skandal Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo yang melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak mulai dari pengusaha hingg presiden dinilai bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan sebuah pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dari Indonesia.Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memberikan sorotan tajam atas status hukum komplotan jenderal polisi tersebut yang dinilainya terlampau "beruntung" hidup dalam era demokrasi di Indonesia.

Pangi meluapkan kegeramannya. Ia menelanjangi realitas bahwa kejahatan sekelas mematamatai kepala negara sejatinya adalah bentuk makar fatal yang tidak memiliki ruang ampun di banyak negara.

Para tersangka, menurutnya, harus bersyukur karena di tanah air mereka masih diberikan hak untuk bernapas dan melalui mekanisme hukum reguler, dimulai dari sekadar sidang etik internal kepolisian.

"Syukur kita negara demokrasi, kalau era rezim dulu, akhir dari sebuah pengkhianatan pasti hilang, enggak bakal ada suara," kata Pangi dikutip Jumat (6/11/2026).

Pangi kemudian membeberkan komparasi mengerikan mengenai nasib para aktor intelijen gelap apabila operasi sabotase serupa dilakukan di negara-negara dengan sistem hukum yang keras. Hukuman bagi pembangkang negara di rezim otoriter sudah pasti berujung pada eksekusi pencabutan nyawa.

"Kalau di negara Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran? Nasibnya pasti sudah dipastikan di-dor, dipenggal, berakhir di tiang gantung," tegas Pangi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.

NASIONAL

Keras! Mahfud MD Sebut Ada Bangkai di Mabes Polri jika Listyo Sigit Tak Dipecat

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.59 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan kritik keras usai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud menilai, Polri harus segera memberhentikan Listyo secara tidak hormat karena statusnya sebagai penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

Mahfud bahkan menyebut keberadaan Listyo di tubuh Polri tanpa pemberhentian dapat menjadi aib bagi institusi tersebut.

“Terutama kalau kayak Listyo ini karena dia menyandang Bintang Maha Putera, pejabat negara. Berarti di Mabes Polri itu ada lambang bangkai di situ kalau dia tidak segera dipecat,” kata Mahfud dalam wawancara eksklusif di YouTube iNews, Kamis (5/11/2026).

Mahfud kemudian menyoroti tanda kehormatan Bintang Mahaputera yang diterima Listyo Sigit. Dia mempertanyakan bagaimana penghargaan negara tersebut masih melekat pada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran hukum.

“Masa Bintang Mahaputera melekat pada orang yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Diketahui, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera atas jasa-jasanya yang dinilai luar biasa di bidang kepolisian maupun bidang lain yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Tanda kehormatan tersebut juga diberikan atas darma bakti dan jasa yang diakui secara luas di tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, Listyo Sigit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Irit Bicara Diminta Tanggapi Kasus Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.38 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jokowi merespons singkat saat ditanya awak media di sela persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Refly Harun Kaitkan Kasus Listyo Sigit dengan Desakan Uji Ulang Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.41 WIB

BANDA ACEH -Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyinggung penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mempertanyakan independensi pengujian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Yang namanya pengujian lab kemarin, kami duga tidak independen. Terbukti apa? Terbukti dari ditangkapnya Listyo Sigit Prabowo yang tidak lain adalah orang dekat Jokowi,” kata Refly di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar ijazah yang diperlihatkan dalam persidangan diperiksa kembali melalui mekanisme pengujian independen.

“Kami meminta agar ada pengujian yang baru, pengujian independen,” tegasnya.

Refly juga menilai, penunjukan dokumen di hadapan pengunjung sidang tidak serta-merta menjawab perdebatan mengenai keaslian ijazah tersebut.

“Kalau hanya ditunjukkan itu hanya show of force saja. Apakah kalian bisa mengerti apakah itu asli atau palsu hanya dengan ditunjukkan, kan tidak bisa,” ujarnya.

Ia bahkan mengklaim ijazah yang diperlihatkan Jokowi dalam persidangan berbeda dengan dokumen yang sebelumnya ditunjukkan Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025.

“Kami 'haqqul yakin' ijazah yang ditunjukkan hari ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025,” ungkapnya.

NASIONAL

Cegah Kasus Penyadapan Presiden Terulang, DPR Kebut RUU Penyadapan, Begini Isinya

Oleh Van · 6 Nov, 19.34 WIB



Seorang tokoh publik memberikan pernyataan kepada media dalam sebuah sesi wawancara penting.

JAKARTA — DPR RI mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan segera dilanjutkan setelah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh mencuat.

Dorongan tersebut disampaikan sejumlah anggota DPR pada Kamis, 5 November 2026, dan Jumat, 6 November 2026. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan.

Selama ini, aturan penyadapan tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral sehingga diperlukan satu payung hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, dan pengawasannya.

Kasus Penyadapan Ilegal Jadi Alarm Perlindungan Privasi

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai pembentukan regulasi khusus penyadapan perlu segera dilakukan agar penggunaan teknologi pengawasan tidak merugikan masyarakat.

"Memang harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang penyadapan. Nah, ini harus disegerakan ya, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring, surveillance, dan seterusnya itu, bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia," ujar Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Kamis, 5 November 2026.

Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan alat sadap oleh lembaga berwenang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Yanuar juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk pengadaan perangkat penyadapan. Karena itu, mekanisme pengawasan dan audit dinilai perlu menjadi bagian penting dalam regulasi.

RUU Penyadapan Akan Atur Batas Kewenangan Aparat

Wacana pembentukan RUU Penyadapan sebenarnya telah dibahas sebelum kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat. Pada Juli 2026, Badan Legislasi DPR menyebut aturan yang tersebar di berbagai undang-undang perlu disatukan dalam satu payung hukum.

Salah satu persoalan krusial yang perlu diputuskan adalah mekanisme pemberian izin penyadapan. Pembahasan mencakup pilihan apakah izin harus melalui penetapan pengadilan atau cukup menggunakan mekanisme internal lembaga penegak hukum.

Anggota Baleg DPR RI Andi Yuliani Paris sebelumnya mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengatur kewenangan tersebut.

"Penyadapan ini harus hati-hati, sebaiknya masyarakat yang benar-benar boleh disadap apabila sudah ada penetapan tersangka, apabila hanya mencari bukti sebaiknya tidak boleh dilakukan penyadapan," ujarnya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Kamis, 2 April 2026.

Selain mekanisme perizinan, pembahasan juga perlu memperjelas batas jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan serta lembaga yang berwenang melakukannya.

Presiden Minta Kasus Dugaan Penyadapan Diusut Transparan

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi sorotan pemerintah disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu, 4 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PAN Minta Gibran Mundur dari Wapres usai Fotonya Dicopot di Gedung DPRD DIY

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.20 WIB



BANDA ACEH - Aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai sorotan luas. Peristiwa tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menilai aksi pencopotan itu bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat.

"Itu bentuk ekspresi atas kekecewaan masyarakat terhadap eksistensi, ya. Wakil Presiden kita yang sudah tidak mempunyai legitimasi lagi, tidak memiliki lagi legitimasi moral sebagai Wakil Presiden," kata Sudding kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Sudding mengimbau Gibran mundur dari Wapres setelah tidak mendapatkan legitimasi lagi dari masyarakat.

"Ketika dia sudah tidak mendapatkan legitimasi moral dari masyarakat seperti itu, sebagai Wakil Presiden dia harus mundur dalam jabatannya," ujar Sudding.

Menurut Sudding, DPR juga bisa memakai hak menyatakan pendapat jika Gibran tak kunjung mundur. Hak menyatakan pendapat itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Mahkamah Agung (MA).

"DPR punya kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden, Saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Sudding.

Sebelumnya diberitakan, aksi nekat sekelompok aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY mencopot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Aksi pencopotan foto terjadi saat gelaran audiensi antara Forum Kebangsaan DIY dengan jajaran pimpinan DPRD DIY.

Massa aksi tersebut dihadiri sejumlah tokoh lokal, seperti mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi selaku Pelindung Forum, serta Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin.

Video tersebut memperlihatkan momen ketika massa secara spontan menurunkan bingkai foto resmi orang nomor dua di Indonesia itu tak lama setelah memasuki ruang sidang. Foto Wapres baru dikembalikan dan dipasang lagi ke dinding ruangan sesudah audiensi tuntas diselenggarakan.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menegaskan aksi mencopot foto Gibran dari dinding gedung dewan disengaja sebagai bentuk protes keras sekaligus simbol pesan Politik.

"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Andai kata DPR RI tidak menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," kata Chirzin kepada awak media

NASIONAL

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.48 WIB

BANDA ACEH -Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan tidak pernah menunjukkan ijazah fisiknya secara langsung kepada Roy Suryo di luar persidangan.

Jokowi menegaskan, pihak yang melontarkan tuduhan seharusnya bertanggung jawab membuktikan tuduhan tersebut, bukan justru meminta dirinya terus-menerus menunjukkan ijazah.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan pengacara Roy Suryo, Refly Harun, dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

“Apakah Saksi pernah menunjukkan ijazah analog, fisik, kepada terdakwa dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu?” tanya Refly.

“Tidak, Yang Mulia. Karena dimulai dari tuduhan. Mestinya, yang menuduh itu yang membuktikan,” jawab Jokowi.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi juga ditanya mengenai kesediaannya apabila ijazah fisik yang telah ditunjukkan di persidangan kembali diperiksa di laboratorium forensik.

Namun, Jokowi menyatakan keberatan dengan permintaan tersebut. Ia beralasan ijazah miliknya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Laboratorium Forensik (Labfor) Polri.

“Saya keberatan, Yang Mulia. Karena ijazah saya sudah diuji di Labfor, Lab Forensik milik Polri,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa ijazah tersebut merupakan dokumen pribadi sehingga dirinya keberatan apabila harus dibawa dan diperiksa berulang kali di berbagai tempat.

“Ini adalah, sekarang ini ijazah itu adalah dokumen pribadi saya. Jadi, saya merasa keberatan kalau ijazah itu ditenteng-tenteng ke mana-mana,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi mendapat pertanyaan mengenai kesesuaian ijazah fisik miliknya dengan file ijazah digital yang diunggah Dian Sandi melalui akun media sosial X. Menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi mengaku tidak memeriksa unggahan itu secara terperinci.

“Saya tidak meneliti sampai sedetail itu, Yang Mulia,” ucapnya.

NASIONAL

Habiburokhman Sebut Polemik Gibran Mungkin Sudah Dibahas di Dewa-dewa Langitan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.51 WIB

BANDA ACEH -Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disambut putusan Mahkamah Agung (MA) perihal polemik penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diyakini sudah dibahas di level elite Politik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Namun begitu, Habiburokhman mengaku belum mengetahui pasti apakah pembahasan tersebut sudah dilakukan lintas fraksi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Irjen Slamet Uliandi Tersangka Baru Penyadapan Presiden, Total 4 Jenderal

Oleh Redaksi · 5 Nov, 20.11 WIB

BANDA ACEH - - Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan Slamet memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

"Insial SU tersangka yang sebelumnya saksi. Hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan SU memenuhu unsur perbuatan melawan hukum," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto di Humas Polri, Kamis (5/11/2026).

Brigjen Suhermanto menjelaskan, Irjen Slamet Uliandi memiliki peran sebagai pembina MC Bareskrim Polri.

"Peran sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri, yang bersangkutan pernah menjabat Kabag monitoring Bareskrim 2010-2019," ujarnya.

Dengan penetapan tersebut, Irjen Slamet yang sebelumnya berstatus saksi kini menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan Irjen Slamet menambah jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi empat jenderal. Sebelumnya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Seskab Teddy Indra Wijaya Ikut Diperiksa dalam Kasus Sadap Prabowo

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.36 WIB



Seorang anggota polisi bernama Ahrie dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berpose bersama di dalam sebuah ruangan. Pria di sebelah kiri mengenakan seragam dinas POLRI lengkap dengan lencana, sedangkan pria di sebelah kanan mengenakan seragam bermotif loreng. Di antara mereka terdapat sebuah meja berukir warna emas dengan latar belakang tirai berwarna krem. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Salah satu tokoh pendiri Partai Gerindra di Wilayah Sumatera, Rahmat Sorialam Harahap, meminta penyidik Bareskrim Polri tidak melewatkan satu pun petunjuk yang berpotensi mengungkap perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, ia membuka kemungkinan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dimintai keterangan apabila penyidik menemukan informasi yang relevan.

Menurut Rahmat, pemeriksaan terhadap siapa pun yang dianggap memiliki informasi penting merupakan kewenangan penyidik.

Karena itu, Teddy pun dapat dimintai keterangan jika keterangannya dinilai mampu membantu memperjelas perkara.

"Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan. Prinsipnya berlaku untuk siapa saja," ungkap Rahmat dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Rahmat menegaskan, setiap informasi yang berkaitan dengan perkara harus diperiksa secara objektif.

Namun, proses pendalaman tersebut juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, termasuk terhadap pihak-pihak yang namanya disebut dalam isu tersebut.

"Setiap informasi yang relevan perlu diuji, baik mengenai dugaan peran langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati," ujar Rahmat.

Ia juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan.

Menurutnya, penting untuk mengetahui apakah hasil sadapan tersebut pernah diteruskan kepada pihak tertentu dan siapa saja yang menerimanya.

Terkait siapa yang perlu diperiksa serta dalam kapasitas apa, Rahmat menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik.

Penentuan itu, kata dia, harus didasarkan pada bukti dan petunjuk yang dapat diuji, bukan sekadar desas-desus.

Rahmat menilai pengungkapan peran masing-masing pihak menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap orang-orang yang bekerja di sekitar Presiden.

Ia pun mengingatkan agar pendalaman perkara dilakukan tanpa tebang pilih, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yang disebut untuk menyampaikan keterangan sesuai prosedur.

Dalam perkembangan kasus ini, penyidik telah menetapkan empat petinggi Polri sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

Dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah nomor telepon, mulai dari milik Presiden RI, pejabat negara, tokoh Politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), LSM, hingga pengusaha.

Aksi itu diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur resmi maupun surat permohonan dari penyidik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Cak Imin Ngaku Ikut Jadi Korban Sadap Listyo Sigit Cs: Sangat Kurang Ajar!

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.56 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar perangkat komunikasi Presiden Prabowo Subianto ternyata turut menyeret nama sejumlah tokoh Politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar bahkan mengaku nomor telepon pribadinya diduga ikut menjadi target dalam operasi tersebut.Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ia mengecam keras tindakan penyadapan tanpa izin tersebut dan menilai pihak-pihak yang melakukannya telah bertindak keterlaluan.

"Terus terang ya, itu kurang ajarlah yang menyadap itu gitu lho. Itu kurang ajar betul. Lebih kurang ajar lagi, saya termasuk yang disadap. Itu sangat kurang ajar itu. Sangat kurang ajar," kata Cak Imin saat berpidato dalam pelantikan DPN Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut mengaku sebenarnya sudah cukup lama mencurigai adanya aktivitas pengawasan terhadap komunikasi pribadinya. Namun, pada saat itu ia tidak memiliki instrumen yang dapat digunakan untuk membuktikan kecurigaannya secara mandiri.

Di tengah pengungkapan perkara tersebut, Cak Imin pun memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Ia menilai langkah tegas Kapolri dalam mengusut kasus yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri merupakan kontribusi penting bagi institusi dan kehidupan politik nasional.

"Tapi salut untuk Kapolri, hormat untuk Kapolri, kerjanya luar biasa, Kapolri menyelamatkan marwah pemimpin kita. Kapolri telah memberikan kontribusi nyata penataan semua kehidupan politik kita supaya lebih sehat. Hormat untuk Kapolri," ucap dia.

Sementara itu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih terus mendalami perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Pada Kamis (5/11/2026), penyidik menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka setelah sebelumnya berstatus saksi.

Dengan penetapan Slamet, jumlah perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang.

Tiga tersangka lainnya yang lebih dahulu ditetapkan dan telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri adalah eks Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Adapun penahanan terhadap Slamet Uliandi untuk sementara ditangguhkan. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya yang sedang mengalami sakit stroke.

NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Jokowi Tak Langsung Perlihatkan Ijazah Asli, Jawabannya Bikin Sidang Riuh

Oleh Redaksi · 5 Nov, 20.05 WIB

BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan tidak langsung menunjukkan ijazah asli saat polemik tudingan ijazah palsu mencuat. Dia mengaku tidak yakin persoalan tersebut akan selesai jika ijazahnya diperlihatkan dalam forum biasa.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, dalam sidang kasus dugaan tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

Awalnya, Abdul Gafur mempertanyakan alasan Jokowi tidak langsung memperlihatkan ijazahnya kepada pihak yang meragukan keaslian dokumen tersebut. Menurutnya, polemik itu mungkin tidak akan berkepanjangan jika Jokowi memperlihatkan ijazah sejak awal.

"Pertanyaan saya, saudara saksi, maaf ya, tidak legowo gitu lah untuk menunjukkan saja ijazah saksi pada waktu itu, sehingga tidak perlu ada sekian kali rektor berbicara, sekian kali saudara harus mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membantah. Padahal hanya satu kali Saudara tunjukkan barangkali urusannya sudah selesai. Mengapa tidak legowo seperti itu, Saudara Saksi?," ujar Abdul Gafur bertanya ke Jokowi dalam sidang, Kamis (5/11/2026).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya telah dua kali menyampaikan imbauan melalui penasihat hukumnya sebelum melaporkan pihak-pihak yang mempersoalkan ijazahnya.

Dia juga menyebut telah membuka kesempatan penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian yang melibatkan Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.

"Yang pertama, saya telah melakukan imbauan dua kali sebelum saya melaporkan. Dua kali saya menyampaikan imbauan lewat penasihat hukum saya, Hasibuan dan Hasibuan, dua kali. Kemudian juga saya memberikan kesempatan untuk kesepakatan perdamaian, yang itu telah dilakukan oleh Bapak Profesor Eggi Sudjana, Pak Damai Hari Lubis, dan Pak Rismon Sianipar. Kami sudah membuka pintu untuk itu," ucap Jokowi.

Namun, Abdul Gafur kembali mendalami alasan Jokowi memilih menawarkan penyelesaian melalui restorative justice dan meminta pihak yang menuding untuk meminta maaf, ketimbang langsung menunjukkan ijazah aslinya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bongkar Fakta di Persidangan, Jokowi Sebut Sosok Dumatno Budi Utomo Masih Anak-Anak Saat Dirinya Lulus

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.30 WIB

BANDA ACEH - Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa tersinggungnya di persidangan setelah dituduh menggunakan foto orang lain berinisial Dumatno Budi Utomo pada dokumen ijazahnya.

Ia menilai tudingan tersebut sangat tidak masuk akal mengingat usia yang bersangkutan saat itu masih sangat belia.

Dalam persidangan yang digelar, Joko Widodo memberikan tanggapan tegas terkait materi video yang dipersoalkan dalam dakwaan. Dirinya mempertanyakan logika dari tudingan yang menyebutkan bahwa ijazah miliknya menggunakan foto sepupu jauhnya tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sosok yang dikaitkan dalam tudingan tersebut merupakan kerabat jauh yang lahir pada tahun sembilan belas tujuh puluh tujuh. Menurut perhitungannya, pada saat ia menyelesaikan pendidikan, usia yang bersangkutan baru menginjak delapan tahun sehingga tuduhan penggantian foto dinilai tidak logis.

Di hadapan majelis hakim, ia juga menegaskan rekam jejak kepemimpinan yang pernah diembannya mulai dari tingkat walikota, gubernur, hingga presiden yang telah melalui proses verifikasi dan seleksi ketat tanpa ada permasalahan administratif sejak awal.

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti digital serta pemutaran rekaman video yang diajukan oleh pihak penuntut umum

NASIONAL

Pengamat Bongkar Siasat Jokowi Pamer Ijazah: Sengaja Biar Publik Lupa Kasus Dugaan Makar

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.48 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio alias Hensa, mencurigai ada strategi Politik di balik keputusan Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya secara terbuka di persidangan.Menurut Hensa, aksi mantan Presiden ke-7 RI tersebut berpotensi menjadi cara untuk mengalihkan perhatian publik dari polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hensa mengakui kedatangan Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026) memang telah dijadwalkan. Namun, ia mengaku tidak menyangka Jokowi akan menunjukkan dokumen pendidikannya secara gamblang di hadapan kamera dan awak media.

"Dia memang menjadwalkan datang, itu saya enggak bantah. Tapi tadinya saya yakin dia enggak akan menunjukkan ijazahnya secara gamblang seperti itu," kata Hensa melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official, Jumat (6/11/2026).

Ia justru mempertanyakan momentum Jokowi memperlihatkan ijazah yang berdekatan dengan terbongkarnya kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo.

"Jadi pertanyaannya bukan soal 5 November. Pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya berdekatan dengan terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo," ujarnya.

Hensa menduga isu penyadapan berpotensi menimbulkan tekanan politik terhadap Jokowi, terlebih karena publik selama ini mengaitkan mantan presiden tersebut dengan sejumlah mantan pimpinan Polri, termasuk dalam konteks kasus yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.

Ia kemudian mengajukan dugaan bahwa isu ijazah sengaja dimunculkan agar Jokowi tidak terus-menerus mendapat pertanyaan wartawan mengenai penyadapan.

"Ini analisa saya ya, ini cara dia menghindari pertanyaan wartawan soal kasus penyadapan. Daripada orang ketemu dia nanyain penyadapan, nanyain kecurigaan keterlibatan, mendingan dia keluarkan isu lain. Apa itu? Ijazah," kata Hensa.

Menurutnya, Jokowi akan lebih mudah menjawab pertanyaan mengenai ijazah karena dokumen tersebut sudah lama menjadi bagian dari polemik yang dihadapinya.

"Kalau ditanya ijazah, dia lebih enak menjelaskan. Ijazah saya kan sudah saya tunjukkan. Daripada ditanya, 'Pak, gimana itu penyadapan?' Lagi pusing dia," ucapnya.

Lebih jauh, Hensa menilai langkah tersebut bisa memberikan waktu bagi Jokowi untuk meredakan tekanan politik sekaligus membuka peluang negosiasi. Ia menyebut posisi politik mantan presiden itu sedang menghadapi situasi yang kurang menguntungkan pada awal pemerintahan baru.

"Dia ada waktu juga mungkin berdoa, semoga isu penyadapan ini segera lari dari dirinya. Apalagi orang sudah ada yang bilang ini makar," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

6 Perwira Ditangkap di Rumah Mantan Kapolri, Tetapi Bukan Listyo Sigit, Siapa Kira-kira?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 16.24 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa penangkapan enam pejabat tinggi dan menengah Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dilakukan pada malam Minggu, 1 November 2026, di kediaman seorang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Mahfud MD menegaskan lokasi tersebut bukan rumah Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.

Dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyebut enam orang yang diamankan terdiri dari tiga Inspektur Jenderal (Irjen) dan tiga Komisaris Besar (Kombes).

Mereka kemudian mengaku melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atas perintah Listyo Sigit, yang saat itu masih menjabat Kapolri sebelum digantikan Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026.

Menurut keterangan Mahfud, setelah pengakuan itu, Listyo Sigit dijemput tengah malam (sekitar pukul 03.00 WIB) oleh Wakapolri dan Kabareskrim Polri.

Namun, ia dilepas kembali menjelang subuh (sekitar pukul 05.00 WIB). Mahfud menduga ada kemungkinan negosiasi, meski akhirnya Listyo tetap ditetapkan sebagai tersangka bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Perkara ini juga melibatkan dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal, dengan barang bukti berupa sejumlah ponsel, iPad, dan flashdisk.

Mahfud menolak menyebut identitas pemilik rumah secara terbuka.

"Itu nanti saja, enggak usah disebut, nanti akan muncul sendiri," ujarnya.

Ia mengaku sudah mendengar informasi penangkapan sejak Senin-Selasa pagi dan memilih diam untuk melihat apakah proses akan dihentikan atau dilanjutkan.

Kasus ini dinilai Mahfud sebagai kejahatan terbesar dalam sejarah Polri karena menyasar kepala negara, bahkan berpotensi dikaitkan dengan dugaan makar, meski Yusril Ihza Mahendra menegaskan sejauh ini hanya menggunakan pasal penyadapan dan UU ITE.

Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada Selasa malam, 3 November 2026.

Listyo, yang sebelumnya juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, telah ditahan.

Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur resmi sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Prediksi: Siapa Mantan Kapolri Pemilik Rumah Itu?

Hingga saat ini, nama pemilik rumah belum diumumkan resmi. Berdasarkan timeline, pengaruh, dan konteks politik yang muncul dalam pernyataan Mahfud (termasuk dugaan hasil sadapan mengalir ke Solo), sejumlah nama mantan Kapolri sebelum Listyo menjadi sorotan spekulasi publik:

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kuasa Hukum Jokowi Puas Bisa Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 di Persidangan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.34 WIB

BANDA ACEH -Kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengaku puas dengan kesaksian mantan Presiden tersebut dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

Yakup mengatakan, Jokowi telah memperlihatkan dokumen ijazah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi dalam persidangan tersebut.

"Kami sangat puas dengan hasilnya, karena akhirnya Pak Jokowi bisa menunjukkan seluruh ijazahnya dari SD sampai S1, semua diperlihatkan," kata Yakup.

Menurut dia, Jokowi juga memberikan penjelasan terperinci mengenai perjalanan akademiknya selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penjelasan itu, lanjut Yakup, mencakup proses pendaftaran kuliah, dokumen kelulusan, hingga hal-hal teknis terkait penyusunan skripsi.

"Pak Jokowi sangat jelas, sangat detail, sangat lengkap menjelaskan dari perkuliahannya, dari pendaftaran, hingga dokumen-dokumen pendukung untuk kelulusan," ujarnya.

Yakup menyebut Jokowi bahkan mampu menjawab pertanyaan mengenai tempat pencetakan skripsi, mesin yang digunakan, hingga dokumen administrasi perpustakaan.

Ia menilai kemampuan Jokowi menjelaskan sejumlah detail tersebut menjadi bagian penting dari pemeriksaan di hadapan majelis hakim.

Yakup juga menanggapi pertanyaan dari pihak terdakwa yang menurut penilaiannya tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara.

Meski demikian, ia mengatakan Jokowi tetap menjawab seluruh pertanyaan dengan tenang dan jelas.

"Kami sangat puas di hari ini. Pak Jokowi bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan ijazahnya di forum yang paling terhormat ini, di depan Yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Pertanyakan Tudingan Ijazah Pakai Foto Dumatno Budi Utomo: Saat Itu Umurnya Baru 8 Tahun

Oleh Van · 5 Nov, 17.23 WIB

JAKARTA — Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026 kembali menjadi perhatian.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa foto di ijazah Strata 1 (S1) tersebut adalah dirinya, bukan sosok lain.

Jokowi menepis tudingan bahwa foto di ijazah adalah Dumatno Budi Utomo, saudara jauhnya.

"Tadi di situ kan ada foto ya Saudara saksi, ya? Ada foto. Itu foto Saudara saksi atau foto Dumatno Budi Utomo?" tanya jaksa di persidangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eksklusif! Mahfud MD Bicara Penyadapan Presiden Prabowo: Segera Pecat Listyo Sigit dari Polri

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.55 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak Polri memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Desakan serupa juga ditujukan kepada dua jenderal polisi lainnya yang terseret dalam perkara tersebut.

Dua jenderal lainnya yang menjadi tersangka yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Mahfud menilai ketiganya harus lebih dahulu diberhentikan dari institusi Polri sebelum menjalani proses peradilan pidana.

"Saya akan bicara yang lebih penting untuk dilakukan oleh Mabes Polri. Segera pecat Listyo Sigit tidak dengan hormat dan semua yang sudah tersangka itu karena sudah terbukti melakukan," kata Mahfud dalam wawancara di YouTube iNews, Kamis (5/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eks Direktur E BAIS Nilai Kasus Penyadapan Mengarah ke Kudeta Senyap, Mirip Pemberontakan PKI?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.35 WIB



Mantan Direktur Intelijen TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Situasi Politik nasional kembali memanas menyusul terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama mantan petinggi kepolisian.

Isu hangat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari mantan Direktur Intelijen TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo.

Dalam diskusi mendalam di siniar Youtube Obor Rakyat Reborn, Poernomo memaparkan analisis intelijen terkait dinamika kekinian yang dinilainya sangat krusial.

Dia bahkan memaparkan bahwa situsi saat ini yang ada sedikit kemiripan dengan pemberontakan PKI.

Ia menamakannya kudeta senyap. Perbuatan yang mencoba menjatuhkan presiden sah namun tanpa peluru dan kekerasan.

Menguak Motif Penyadapan dan Dugaan Tekanan Politik

Kasus penyadapan ilegal yang melibatkan eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi polri lainnya telah memicu polemik luas di tengah masyarakat.

Pemerintah melalui Mensesneg dan pihak Istana menyatakan bahwa persoalan ini tengah ditangani secara serius dan transparan, serta diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.

Namun, dari sudut pandang analisis intelijen strategis, Brigjen (Purn) Poernomo menilai bahwa tindakan pemasangan alat sadap di lingkar kekuasaan tidak terjadi secara kebetulan atau berdiri sendiri.

Menurutnya, aksi tersebut membutuhkan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung ke pusat kekuasaan.

"Penyadapan ini bukan berjalan sendiri; ada tangan-tangan yang menempatkan alat tersebut dan mengelolanya selama bertahun-tahun. Ini adalah langkah awal untuk melakukan sebuah kudeta, bukan dengan letusan senjata, melainkan sebuah kudeta senyap (silent coup)," ujar Poernomo, dikutip fajar.co.id, Kamis (5/11/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa informasi dan rekaman yang diperoleh dari hasil sadapan tersebut dikhawatirkan digunakan sebagai instrumen tekanan psikologis untuk menggoyang stabilitas pemerintahan.

Sejumlah pengamat hukum dan politik sebelumnya juga menduga bahwa muara dari tekanan ini berkaitan dengan upaya melemahkan posisi Presiden Prabowo Subianto di tengah masa transisi kepemimpinan nasional.

Posisi Gibran dan Keputusan Lembaga Konstitusi

Selain isu penyadapan, perbincangan hangat turut menyoroti keabsahan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul serangkaian putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam diskusi tersebut, disinggung mengenai polemik keabsahan dokumen administrasi serta keputusan hukum tertinggi yang telah diketok oleh lembaga yudikatif.

Poernomo berpandangan bahwa dua putusan dari mahkamah tinggi negara tersebut telah memberikan kepastian hukum yang harus disikapi secara bijak oleh lembaga legislatif …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kasus Tambang Bengkulu Utara Berujung Penjara, Hakim Singgung Angka Fantastis Rp1,3 Triliun!

Oleh Van · 6 Nov, 17.24 WIB



Petugas Kejaksaan RI melakukan pengawalan ketat terhadap seorang tahanan berompi oranye.

BENGKULU — Mantan Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi, divonis 3 tahun 4 bulan penjara dalam kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan batu bara, Jumat, 6 November 2026.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu juga menjatuhkan denda Rp750 juta subsider 165 hari kurungan kepada Imron.

Dalam perkara yang sama, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bengkulu Utara, Fadilah Marik, dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 140 hari kurungan.

Hakim Ungkap Keuntungan Perusahaan Lebih dari US$83 Juta

Ketua Majelis Hakim Achmadsyah Ade Murry mengungkapkan, perkara tersebut berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak melalui PT Ratu Samban Mining (RSM).

"Kedua terdakwa bersama-sama dengan terpidana Sonny Adnan yang sebelumnya sudah diputus, menguntungkan Jubaira dan Maihael Godath serta beberapa perusahaan lainnya sebesar 83 juta dolar AS lebih yang masuk ke dalam rekening PT Ratu Samban Mining," kata Achmadsyah saat membacakan putusan.

Majelis hakim menilai Imron dan Fadilah berperan aktif dalam tindak pidana korupsi terkait aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.

Namun, hakim belum memasukkan persoalan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari pertimbangan karena dinilai masih berupa asumsi.

Berawal dari Pengalihan Izin Tambang pada 2007

Perkara ini bermula dari penerbitan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 327 dan 328 Tahun 2007.

Kedua keputusan tersebut mengatur pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Baratama kepada PT RSM untuk kegiatan eksploitasi, pengangkutan, dan penjualan batu bara.

Dalam dakwaan, Imron disebut menerima uang Rp600 juta dari Direktur Utama PT RSM saat itu, Sony Adnan, melalui Fadilah Marik.

Jaksa menyebut uang tersebut diberikan secara bertahap sekitar 2007 sebagai bagian dari pengurusan pemindahan izin pertambangan.

Penerbitan izin juga dinilai bermasalah karena tidak didukung rekomendasi teknis dan administratif dari instansi terkait.

Kedua Pihak Masih Punya Kesempatan Ajukan Banding

Sebelum putusan, jaksa menuntut Imron dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar.

Sementara Fadilah dituntut 4 tahun penjara serta denda Rp500 juta. Putusan hakim terhadap keduanya lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

Atas putusan tersebut, pihak terdakwa maupun jaksa masih memiliki kesempatan menentukan sikap, termasuk menerima putusan atau mengajukan banding.(*)

NASIONAL

Jokowi Heran Dituding Punya Ijazah Palsu: Aslinya Saja Belum Dilihat

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.35 WIB

BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Menurut dia, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena dilontarkan oleh pihak yang bahkan belum pernah melihat ijazah aslinya.

"Belum lihat ijazah asli kok bilang ijazah palsu, logika berpikirnya seperti apa," kata Jokowi saat memberikan kesaksian dalam persidangan perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis 5 November 2026.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi akhirnya memperlihatkan ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia juga menunjukkan dokumen pendidikan lainnya, mulai dari ijazah SD, SMP, hingga SMA.

Selain memperlihatkan ijazah, Jokowi menjelaskan proses penyusunan skripsinya ketika menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Dia mengaku harus mengajukan proposal judul hingga tiga kali sebelum mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro.

"Yang Mulia, dalam hal skripsi saya ingin menyampaikan bahwa skripsi ini kami buat dengan mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbing skripsi saya yaitu Prof Dr Ir Achmad Soemitro," ujarnya.

Jokowi juga menyinggung sejumlah dokumen yang beredar dan disebut sebagai halaman pengesahan skripsinya. Dia menegaskan, dokumen tersebut tidak sesuai dengan skripsi miliknya karena tidak mencantumkan identitas skripsi Jokowi dan justru menampilkan wajah orang lain.

Dia turut meluruskan penggunaan istilah dalam dokumen tersebut. Menurut Jokowi, karya ilmiah yang disusunnya merupakan skripsi, bukan tesis sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dipersoalkan.

"Tulisan di saya juga skripsi, tidak ada tulisan tesis," tegasnya.

Jokowi juga menjelaskan bahwa pada 1985, ribuan skripsi dicetak menggunakan jenis huruf Times New Roman.

Persidangan ini berkaitan dengan perkara yang menjerat Roy Suryo sebagai terdakwa. Dia didakwa melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran terkait informasi elektronik menyangkut tudingan ijazah palsu Jokowi.

Jaksa juga mendakwa Roy melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.

Atas perbuatan tersebut, Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara personal.

Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ACEH

Wagub Aceh Bersama Kapolda Jenguk Korban Insiden Bendera di Pidie

Oleh Redaksi · 5 Nov, 22.18 WIB

PIDIE – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, bersama Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menjenguk para korban insiden pengibaran dan penertiban bendera Bulan Bintang di Kabupaten Pidie, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wagub dan Kapolda turut didampingi Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Teuku Mustafa Kamal, Anggota DPRA Khairil Syahrial dari Fraksi Gerindra, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Dirintelkam Polda Aceh, Kombes Pol Said Anna Fauza, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, serta Karo Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Aceh terhadap masyarakat yang menjadi korban dalam peristiwa di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Pada kesempatan itu, Fadhlullah bersama Kapolda Aceh menyempatkan diri berdialog langsung dengan para korban dan keluarga. Mereka mendengarkan berbagai keluh kesah, masukan, serta aspirasi masyarakat terkait peristiwa yang terjadi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketidakhadiran Tito Karnavian dalam Pertemuan Purnawirawan Polri: Ada Apa?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 16.52 WIB



Gambar hitam putih ini menunjukkan sekelompok Purnawirawan perwira polisi yang berdiri sejajar di depan dinding berlogo Tri Brata. Di sisi kanan, terdapat inset lingkaran berwarna yang memperlihatkan Tito Karnavian sedang memberikan pernyataan resmi mengenakan seragam dinas. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pertemuan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 5 November 2026 menjadi perhatian di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri itu dihadiri sejumlah mantan Kapolri dan purnawirawan jenderal.

Mereka menyampaikan dukungan terhadap penegakan hukum serta menegaskan pentingnya menjaga soliditas institusi Polri.

Namun, ada satu nama yang menarik perhatian karena tidak terlihat dalam pertemuan tersebut, yakni Tito Karnavian, mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.

Ketidakhadiran Tito menimbulkan pertanyaan, terlebih pertemuan berlangsung dalam situasi Politik dan institusional yang sensitif.

Apalagi, kasus yang sedang ditangani menyangkut dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak, serta melibatkan figur-figur penting di tubuh kepolisian.

Sejauh pemberitaan yang tersedia, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan Tito tidak hadir. Belum diketahui pula apakah seluruh mantan Kapolri memang diundang dalam pertemuan tersebut atau apakah Tito telah menerima undangan.

Karena itu, ketidakhadirannya tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai bentuk penolakan, ketidaksetujuan, atau sikap politik tertentu.

Dalam situasi seperti ini, membangun kesimpulan tanpa keterangan yang jelas justru berisiko melahirkan spekulasi.

Ketidakhadiran Tito sebenarnya bukan kali pertama menjadi perhatian dalam pertemuan yang melibatkan para mantan Kapolri.

Pada pertemuan mantan Kapolri dengan Kapolri Listyo Sigit pada 2022, Tito dan Idham Azis juga tidak terlihat hadir.

Pada kegiatan PP Polri tahun 2023, keduanya kembali tidak hadir dan saat itu Ketua PP Polri Bambang Hendarso Danuri menyebut adanya kesibukan lain.

Namun, alasan tersebut merupakan penjelasan untuk kegiatan sebelumnya dan tidak otomatis dapat digunakan untuk menerangkan ketidakhadiran Tito pada 5 November 2026.

Yang menarik, pertemuan kali ini berlangsung ketika Polri sedang menghadapi ujian serius terkait dugaan penyadapan ilegal dan penetapan sejumlah personel sebagai tersangka.

Dukungan para purnawirawan terhadap Kapolri tentu memiliki makna institusional, tetapi absennya beberapa figur penting juga membuka ruang pertanyaan mengenai dinamika hubungan antar elite kepolisian.

Publik tentu berhak mengetahui apakah ketidakhadiran Tito semata-mata karena agenda kedinasan atau ada pertimbangan lain.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Infonya, Lebih dari 6.000 Nomor Telepon Disadap, Tak Ada Satupun Keluarga Jokowi & Kroninya

Oleh Redaksi · 5 Nov, 18.31 WIB

BANDA ACEH - Politisi dan jurnalis senior Akbar Faizal mengungkap bahwa lebih dari 6.000 nomor telepon masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Dari ribuan nama tersebut, menurutnya, tidak ada satu pun yang berasal dari keluarga atau orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).Akbar Faizal sendiri menyebut namanya masuk dalam daftar sadap itu. Selain dirinya, sejumlah tokoh publik lain juga disebut tercantum, di antaranya akademisi hukum tata negara Feri Amsari dan akademisi hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Mochtar. Bahkan, pejabat internal Polri, yaitu Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti yang menjabat Kabakintelkam Polri, juga disebut ada dalam daftar.

"Sampai pejabat kepolisian juga kena sadap, kurang ajar sekali," ujar Akbar Faizal, Kamis (5/11/2026). Ia menjelaskan daftar tersebut sudah disusun dalam dokumen tebal yang memuat nama, nomor telepon, serta jabatan atau profesi masing-masing target.

Yang paling disorot Akbar Faizal adalah absennya nama-nama yang terafiliasi dengan lingkungan terdekat Jokowi. "Tak satupun keluarga Jokowi dan kroni-kroninya yang masuk daftar ini," katanya sambil menceritakan pengamatannya terhadap dokumen daftar sadap. Tidak ditemukan pula nomor telepon Pratikno maupun anggota keluarga Jokowi. Tidak ada nama yang dikenal sebagai bagian dari "Kelompok Solo" dalam daftar yang sedang ditelusuri.

Pernyataan Akbar Faizal muncul di tengah proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal. Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi lainnya—Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH)—sebagai tersangka. Mereka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Sasaran yang disebutkan penyidik mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh Politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file dan log hasil sadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Kasus berawal dari laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Daftar Target Penyadapan Ilegal Terbongkar: Nama Luhut Tidak Ada

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.28 WIB



Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (kanan). FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pusaran skandal penyadapan ilegal yang menjerat jenderal-jenderal polisi papan atas terus memicu spekulasi publik.

Di tengah deretan nama pejabat negara dan tokoh Politik papan atas yang masuk radar pengintaian gelap, satu nama besar dipastikan meleset dari daftar target dia adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan dokumen penanganan perkara dan keterangan penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri, nama tokoh senior yang dikenal memiliki pengaruh kuat di lingkaran pemerintahan tersebut sama sekali tidak tercantum dalam daftar tokoh yang disadap oleh para tersangka.

"Nama Luhut Binsar Pandjaitan tidak masuk dalam daftar target penyadapan yang dilakukan oleh para tersangka," ungkap sumber internal kepolisian terkait penanganan kasus mega-skandal ini.

Fokus Menyasar Prabowo hingga Tokoh Politik

Seperti diketahui, aksi penyadapan yang diotaki oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya termasuk Irjen Slamet Uliandi alias "Kapten Jack" terfokus pada lingkaran utama Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh politik aktif, aktivis LSM, dan insan pers.

Absennya nama Luhut dari daftar incaran penyadapan ini menimbulkan beragam tafsir di kalangan pengamat.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa daftar nama yang dikantongi penyidik murni berdasarkan temuan barang bukti digital dari instrumen monitoring center Bareskrim Polri.

Saat ini, Tim Khusus (Timsus) di bawah komando Kabareskrim Komjen Asep Safrudin terus mendalami motif di balik pemilihan daftar nama target penyadapan tersebut, sekaligus mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak yang memberikan perintah maupun mengeksekusi aksi ilegal ini.

Bareskrim Polri belum mengonfirmasi secara resmi daftar nama yang beredar luas di media sosial terkait kasus dugaan penyadapan ilegal (menggunakan sistem Lawful Interception Management System / LIMS) yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya.

Dokumen tidak resmi yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp memuat sekitar 43 hingga 64 nama (dengan sebagian masih berupa inisial) dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, pimpinan ormas/LSM, pengusaha, hingga insan pers.

Sejumlah tokoh nasional yang namanya tercantum dalam daftar liar/belum terverifikasi tersebut meliputi:

Presiden & Mantan Presiden/Wakil Presiden:
- Prabowo Subianto
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- Megawati Soekarnoputri
- Jusuf Kalla

Tokoh Politik & Pejabat/Mantan Pejabat:
- Surya Paloh
- Sufmi Dasco Ahmad (Dasco)
- Sjafrie Sjamsoeddin
- Hasto Kristiyanto
- Muhaimin Iskandar (Imin)
- Bahlil Lahadalia

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Satgas PRR Salurkan Puluhan Paket Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Barat

Oleh Aceh Barat · 5 Nov, 21.25 WIB

MEULABOH – Kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir terus ditunjukkan pemerintah melalui penyaluran bantuan kemanusiaan. Kali ini, puluhan paket bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI disalurkan kepada warga terdampak banjir di Desa Pasie Aceh Tunong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Kamis, (05/11/26).

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Bencana Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Brigadir Jenderal Marinir Guslin hadir mewakili Kepala Satgas PRR, didampingi Anggota Satgas Nasional Komisaris Besar Polisi Roy Huwae dan Gatot Satria Wijaya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Ungkap Lokasi Penyadapan Prabowo, Ternyata Berlangsung di Lingkungan Mabes Polri

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.19 WIB



Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kokoh dengan lambang emas di bagian depan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Bareskrim Polri mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Aktivitas penyadapan tersebut dipastikan tidak dilakukan dari markas khusus atau tempat rahasia milik para tersangka, melainkan berlangsung di lingkungan Mabes Polri.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, menjelaskan bahwa aktivitas tersebut dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi (pati) Polri di lingkungan institusi kepolisian.

"(Lokasi penyadapan) di lingkungan Polri," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Suhermanto juga menjelaskan perkembangan penanganan perkara, termasuk keterlibatan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi, yang ditetapkan sebagai tersangka.

Meski telah berstatus tersangka, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan.

Suhermanto mengatakan keputusan tersebut diambil karena Slamet masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.

"Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke," ujarnya.

Bareskrim menyebut Slamet diduga memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada periode 2010 hingga 2019.

Berdasarkan hasil penyidikan, Slamet diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan yang dilakukan tersangka lainnya.

Suhermanto mengungkapkan, pada Oktober 2026, Irjen Ahrie Sonta Nasution sempat meminta izin kepada Slamet untuk menghapus berkas hasil penyadapan.

"Tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ungkapnya.

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Penyadapan diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh Politik, pimpinan media, organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob.

Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hot! Beredar Kabar Mantan Kapolri yang Menjabat di Pemerintahan Terlibat Penyadapan

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.32 WIB



BANDA ACEH - Aktivis media sosial Buni Yani mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan menyusul beredarnya kabar dugaan keterlibatan mantan Kapolri yang kini menduduki jabatan di pemerintahan dalam kasus penyadapan.Buni Yani menilai, kabar tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menunjukkan adanya persoalan di dalam lingkaran pemerintahan. Ia mengingatkan agar dugaan tersebut tidak dibiarkan tanpa penjelasan dan penyelidikan menyeluruh.

“Beredar kabar mantan Kapolri yang sekarang mendapatkan jabatan di pemerintahan juga ikut terlibat dalam penyadapan. Pak @Prabowo harus cepat bertindak,” kata Buni Yani di akun X, Jumat (6/11/2026).

Menurut dia, dugaan keterlibatan pejabat yang pernah memimpin institusi kepolisian dalam kasus penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius. Apalagi, jika dugaan tersebut berkaitan dengan upaya melemahkan pemerintahan dari dalam.

Buni Yani bahkan menduga terdapat proses pembusukan pemerintahan yang dilakukan secara sistematis. Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan kemungkinan adanya agenda Politik terorganisasi yang mengarah pada upaya menggoyahkan pemerintahan Prabowo.

“Rupanya pembusukan dalam pemerintahan secara sistematis dilakukan. Ini makar yang terencana,” tegasnya.

Pernyataan Buni Yani tersebut menambah panjang sorotan publik terhadap dugaan penyadapan yang belakangan menjadi isu politik nasional.

Jika kabar mengenai keterlibatan mantan Kapolri yang kini menjabat di pemerintahan benar adanya, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga integritas pejabat negara dan keamanan Presiden.

Meski demikian, dugaan keterlibatan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum. Pihak-pihak yang disebut dalam kabar tersebut juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.

Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta apakah terdapat agenda politik di balik operasi tersebut.

ACEH

Seluruh OPD Aceh Barat Didorong Terintegrasi dalam Satu Data

Oleh Aceh Barat · 5 Nov, 20.04 WIB

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026. Forum yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut digelar di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat, Kamis (5/11/26).

Kegiatan dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Wistha Nowar, didampingi Kepala Bapperida Abdul Wahab, Kepala BPS Rochadi, serta Kepala Diskominsa Dedi Mulianda.

Forum ini bertujuan memperkuat integrasi data pembangunan agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah dokumen penting meliputi Kesepakatan Daftar Data 2027, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat 2025–2029, Manajemen Hak Akses Data, Pemeriksaan Data, serta Penggunaan Data Tunggal melalui Portal SATURASI.

Wistha Nowar mengatakan, program Satu Data merupakan salah satu prioritas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat yang dikemas dalam program Satu Data untuk Gerak Sinergi Membangun Negeri (SATURASI).

Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data pembangunan, mulai dari data perencanaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), hingga data sektoral lainnya.

Menurut Wistha, keterpaduan data akan mempercepat pertukaran informasi antarinstansi pemerintah daerah maupun pusat sekaligus meningkatkan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

DPMG Aceh Barat Nilai Tujuh Gampong Berprestasi 2026

Oleh Aceh Barat · 5 Nov, 20.17 WIB

MEULABOH– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat melakukan penjaringan dan penilaian Gampong Berprestasi Tahun 2026 terhadap tujuh gampong. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong.

Kepala DPMG Aceh Barat, Drs. Marjan Hanafie Lubis, M.Si., mengatakan penilaian berlangsung pada 2–5 Oktober 2026 dengan melibatkan tujuh gampong dari sejumlah kecamatan.

Ketujuh gampong tersebut yakni Gunong Mata Ie (Panton Reu), Sawang Teubei (Kaway XVI), Ulee Blang (Bubon), Reusak (Samatiga), Kuta Padang (Johan Pahlawan), Pasi Pinang (Meureubo), dan Alue Batee (Arongan Lambalek).

"Penilaian berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dengan tiga aspek utama, yakni pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan," kata Marjan, Kamis (5/11/26).

Menurutnya, penilaian tidak hanya mencakup kelengkapan administrasi, tetapi juga capaian program dan manfaatnya bagi masyarakat. Sejumlah indikator yang dinilai antara lain pelaksanaan kegiatan keagamaan, pembentukan Satgas Pageu Gampong, kebersihan lingkungan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Tim penilai juga mengevaluasi keberhasilan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pemberdayaan perempuan melalui PKK dan kelompok usaha bersama, pembinaan olahraga, penyelenggaraan majelis taklim, pemberian beasiswa bagi Aneuk Beut, serta program sosial seperti santunan kematian, rehabilitasi rumah dhuafa, dan layanan dokter bagi warga yang menderita sakit menahun.

Marjan menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, data capaian kinerja, serta bukti pendukung pelaksanaan program dan kegiatan gampong selama 2025 dan 2026.

Ia menegaskan, penilaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah gampong untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat inovasi, dan mengoptimalkan potensi daerah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pemerintah Putuskan P3K Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Ini Daftar Profesinya

Oleh Van · 6 Nov, 15.50 WIB



Momen konferensi pers resmi yang menunjukkan koordinasi antar instansi pemerintah.

JAKARTA — Pemerintah memutuskan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga medis, Satpol PP, hingga tenaga teknis lainnya.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan sebelum menetapkan peningkatan status kepegawaian tersebut.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, ini termasuk lintas profesi," kata Prasetyo.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi yang selama ini menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan status tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga tenaga dari sejumlah sektor pemerintahan lainnya.

Guru, Dosen hingga Damkar Masuk Daftar

Prasetyo menyebut dosen dan petugas pemadam kebakaran sebagai bagian dari kelompok yang akan memperoleh peningkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

"Ini termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," ujar Prasetyo.

Selain dua profesi tersebut, pemerintah juga memasukkan tenaga kesehatan dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Kemudian satpol PP, kemudian nakes atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelaksana lain. Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu," sambungnya.

Dengan pengumuman tersebut, kelompok profesi yang disebut secara langsung dalam kebijakan ini meliputi dosen, petugas damkar, Satpol PP, tenaga medis, serta tenaga teknis atau tenaga pelaksana lainnya.

Sementara itu, guru juga termasuk dalam penataan status P3K paruh waktu yang telah disiapkan pemerintah untuk mulai berlaku pada 2027.

P3K Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS

Tak hanya meningkatkan status P3K paruh waktu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi pegawai yang sudah berstatus P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Prasetyo menyampaikan bahwa kesempatan tersebut diberikan kepada P3K penuh waktu yang ingin menempuh jalur menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prof Jimly: Gibran Sudah Memenuhi Syarat Dimakzulkan

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.46 WIB



BANDA ACEH — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan atau impeachment.

Jimly bahkan menilai, secara konstitusional, Gibran telah memenuhi salah satu alasan dasar untuk dimakzulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Menurut Jimly, putusan MA tersebut memiliki benang merah dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK terkait gugatan sebelumnya mengenai syarat pencalonan Gibran sebagai Wapres dua tahun lalu.

Jimly menegaskan, putusan MA kini menghadirkan fakta baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam proses sengketa hasil pemilihan presiden di MK dua tahun lalu.

"Esensinya putusan Mahkamah Agung itu membuktikan bahwa sebenarnya cawapres Gibran temporer itu tidak memenuhi syarat," ujar Jimly dalam kanal YouTube dalam program talkshow ROSI di KompasTV sebagaimana dikutip pada Kamis (5/11/2026).

Jimly menjelaskan, status Gibran sebagai wakil presiden sejak dilantik hingga saat ini tidak serta-merta menjadi tidak sah. Sebab, pada saat sengketa hasil pemilu diputus MK, Gibran dinyatakan memenuhi syarat sehingga status kemenangannya tetap sah.

Namun, menurut dia, munculnya bukti atau fakta baru melalui putusan MA membuka persoalan konstitusional yang berbeda.

"Dulu dua tahun yang lalu dia memenuhi syarat. Sudah diputus waktu perselisihan hasil pemilu oleh MK, dia memenuhi syarat, maka dia sah. Maka statusnya sebagai pemenang dan juga sebagai wakil presiden sampai 2026 itu sah, enggak ada masalah," jelasnya.

"Tetapi ada novum, ada bukti baru, ada fakta baru yang membuktikan, 'Eh, ternyata dia sebetulnya enggak memenuhi syarat'. Nah, itu dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung," sambung Jimly.

Jimly kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Salah satu alasan pemberhentian adalah apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Selain itu, terdapat alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Menurut Jimly, frasa "tidak lagi memenuhi syarat" tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai ketidakmampuan menjalankan tugas akibat kondisi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Sabang Dorong Perluasan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.58 WIB

SABANG – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal menjadi perhatian Pemerintah Kota Sabang.

Wali Kota Sabang mendorong penambahan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan saat menghadapi risiko kerja maupun kematian.

Hal tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di Ruang Rapat Wali Kota Sabang, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menekankan pentingnya meningkatkan jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah manfaat Jaminan Kematian (JKM), yang memberikan santunan hingga Rp42 juta bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

Zulkifli mengatakan, selama ini Pemko Sabang memberikan santunan sebesar Rp5 juta kepada keluarga warga yang meninggal dunia. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat.

“Selama ini Pemerintah Kota Sabang memberikan santunan Rp5 juta kepada warga yang meninggal dunia. Namun, melalui BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat yang terdaftar bisa mendapatkan santunan hingga Rp42 juta. Ini tentu perbedaan yang cukup jauh,” ujarnya.

Zulkifli berharap semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja informal, dapat memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin semakin banyak masyarakat yang mendapatkan perlindungan ini. Karena itu, penting bagi para pekerja untuk memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar mereka memiliki jaminan ketika menghadapi risiko yang tidak kita harapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Saiful Hidayat menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sabang bertujuan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan pekerja, terutama sektor informal seperti nelayan.

Menurutnya, upaya tersebut juga dapat melibatkan perusahaan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pembiayaan perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Soroti Insiden di Pidie, Pemuda Muhammadiyah Aceh Minta Aparat Utamakan Pendekatan Humanis Tanpa Senjata Api

Oleh Redaksi · 5 Nov, 23.05 WIB

BANDA ACEH – Pemuda Muhammadiyah Aceh sangat menyayangkan tindakan represif aparat keamanan dalam penertiban massa di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan sejumlah warga mengalami luka-luka.

Peristiwa yang terjadi pada Rabu (4/11/2026) tersebut dilaporkan menyebabkan seorang warga meninggal dunia akibat diduga terkena tembakan.

Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh, Sudarliadi mendesak agar peristiwa ini diusut secara tuntas, transparan, dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penembakan tersebut serta memastikan proses hukum berjalan tanpa tebang pilih.

“Setiap tindakan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum harus tetap berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Oleh Redaksi · 6 Nov, 14.03 WIB



BANDA ACEH -Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terus bergulir dinilai belum tentu berdampak pada penurunan dukungan publik terhadap mantan kepala negara tersebut.

Dinamika Politik dan cara masyarakat memandang persoalan itu turut memengaruhi respons terhadap Jokowi.

Pengamat Politik Iyyas Subiakto mengatakan, kontroversi yang melibatkan seorang tokoh tidak selalu berujung pada berkurangnya dukungan. Dalam situasi tertentu, tekanan atau kritik yang dinilai berlebihan justru dapat memunculkan solidaritas dari kelompok masyarakat yang merasa tokoh tersebut diperlakukan tidak adil.

“Kalau ada orang baik terlihat ditekan maka reaksi masyarakat akan menyatu membelanya,” ujar Iyyas dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Jumat 6 November 2026.

Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan perjalanan politik Jokowi, termasuk dinamika yang terjadi menjelang hingga berlangsungnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Iyyas, meskipun Jokowi tidak lagi menjadi peserta pemilihan, posisinya dalam dinamika politik nasional saat itu masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat.

Ia juga menyinggung kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 sebagai gambaran bahwa pengaruh politik Jokowi ketika itu masih diperhitungkan.

“58 persen hasil pilpres itu telak,” katanya.

Terkait polemik ijazah, Iyyas berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Perdebatan mengenai keabsahan dokumen harus mengacu pada bukti dan mekanisme hukum, sementara penilaian terhadap kepemimpinan seseorang merupakan persoalan yang lebih luas.

Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik maupun meminta penjelasan atas persoalan yang menyangkut pejabat dan mantan pejabat publik. Karena itu, proses pemeriksaan fakta dan penghormatan terhadap mekanisme hukum menjadi penting agar perdebatan tidak hanya berkembang berdasarkan persepsi masing-masing pihak.

Iyyas juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan amanah dari masyarakat. Karena itu, kepentingan publik harus tetap menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan negara.

“Setelah menang pemilu atau pilpres mereka adalah pegawai rakyat,” ujarnya.

Pandangan Iyyas menunjukkan bahwa polemik yang dihadapi Jokowi tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran untuk menilai perubahan dukungan masyarakat terhadap dirinya.

Besarnya dukungan publik terhadap seorang tokoh tetap perlu dilihat melalui berbagai indikator yang dapat dipertanggungjawabkan.

Intensitas perdebatan maupun respons kelompok pendukung saja belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan persepsi masyarakat.

NASIONAL

Dirut KAI Bobby Rasyidin Buka Suara soal KPK Sita Rp2 Miliar: Saya Sangat Sedih

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.16 WIB



BANDA ACEH - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin buka suara soal penyitaan uang Rp2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyitaan itu disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018-2023.

Bobby mengaku sedih melihat banyaknya pemberitaan seolah penyitaan tersebut dilakukan baru-baru ini.

"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," kata Bobby dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11/2026).

Dia menyatakan saat ini sedang fokus mengatasi persoalan terkait kereta api. Dia sedang berada di Yogyakarta untuk menginspeksi keselamatan pelintasan sebidang.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) berlangsung tanpa ada kecelakaan atau zero accident.

"Mari kita sambut libur Nataru dengan perjalanan kereta api yang semakin baik," ujar Bobby.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyitaan itu terjadi pada tahun lalu di bulan Agustus.

"Bahwa penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi kami luruskan penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu," kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Budi menyebut, penyitaan ini bermula dari Bobby Rasyidin yang mengembalikan sendiri uang tersebut. Menurut Budi, uang yang disita itu diduga berasal dari salah satu tersangka perkara tersebut. Namun, identitasnya belum diungkap.

"Bahwa dalam penyitaan tersebut yang bersangkutan secara kooperatif kemudian menyerahkan ataupun mengembalikan sejumlah uang Rp2 miliar tersebut, yang kemudian atas pengembalian ini dilakukan penyitaan oleh penyidik," ujarnya

LINGKUNGAN

Jelang Peringatan 100 Tahun Panas Bumi Indonesia, PGE Percepat Pengembangan Menuju Kapasitas 1 GW

Oleh Van · 5 Nov, 17.12 WIB

JAKARTA — 5 November 2026 — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) terus memperkuat perannya dalam perjalanan panjang pengembangan panas bumi Indonesia yang memasuki usia satu abad. Berawal dari penemuan potensi panas bumi pada 1926 di Kamojang, Jawa Barat, wilayah ini kini berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan energi panas bumi nasional.

Momentum satu abad ini turut dimaknai Direktur Utama PGE Ahmad Yani. Menurutnya, komitmen terhadap energi bersih dan kinerja bisnis yang solid dapat berjalan beriringan.

“Tujuan kami adalah untuk melayani masyarakat, baik dengan menyediakan pasokan listrik berbasis energi panas bumi yang tersedia setiap saat maupun Beyond Electricity. Sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong transisi energi dan ketahanan energi nasional, ekspansi bisnis yang kami lakukan difokuskan untuk memberikan manfaat panas bumi sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kinerja positif ini menjadi bekal bagi kami untuk melayani masyarakat,” jelas Ahmad Yani.

Sejalan dengan fokus ekspansi tersebut, PGE kini mengelola kapasitas terpasang secara mandiri (own operation) sebesar 727 megawatt (MW). Kapasitas ini ditargetkan naik menjadi 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2033 melalui pengembangan organik, anorganik, dan akselerasi proyek. Untuk itu, PGE mengoptimalkan aset eksisting, memperluas kapasitas, dan mengembangkan sumber pendapatan baru.

Langkah menuju target tersebut didukung kinerja positif PGE sepanjang kuartal III-2026. Mengacu pada laporan keuangan per 30 September 2026, laba bersih Perseroan tumbuh 21,45 persen secara year-on-year (YoY), melampaui pertumbuhan pendapatan yang naik 10,46 persen YoY.

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat mengatakan, capaian ini mencerminkan konsistensi strategi bisnis Perseroan yang efektif dan efisien.

“Proyek panas bumi PGE adalah proyek jangka panjang yang berjalan multi-years. Karena itu, pertumbuhan tidak hanya diukur dari penambahan kapasitas, tetapi juga dari kemampuan Perseroan menjaga profitabilitas dan kesehatan keuangan di setiap tahap pengembangan. Dengan prinsip growth with discipline, kami memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, menguntungkan, dan berkelanjutan. Harapannya, investasi yang kami tanam hari ini dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian dan masyarakat,” ujar Fransetya.

Pertumbuhan tersebut tercermin dalam kinerja PGE sepanjang Januari hingga September 2026: Pendapatan : US$352,20 juta, naik 10,46 persen YoY. Laba bersih : US$126,62 juta, naik 21,45 persen YoY. EBITDA : US$287,77 juta, naik 15,58 persen YoY.

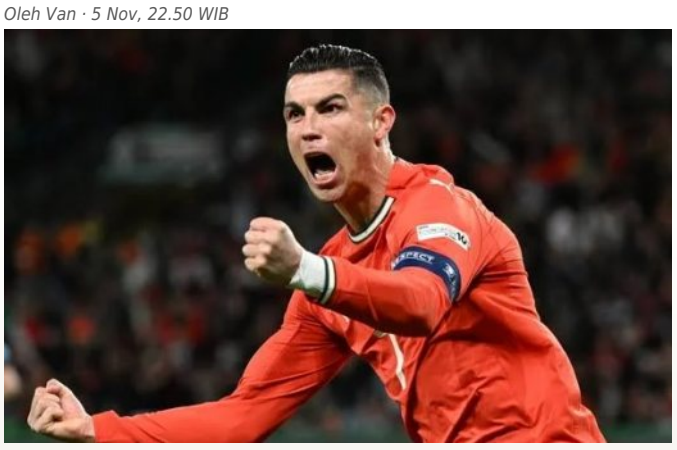
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Cristiano Ronaldo Resmi Gantung Sepatu di Timnas Portugal

Oleh Van · 5 Nov, 22.50 WIB



Gairah dan dedikasi luar biasa dari Cristiano Ronaldo saat membela tim nasional. Sang kapten menunjukkan semangat pantang menyerah di setiap pertandingan.

JAKARTA – Dunia sepak bola mendapat kabar besar. Cristiano Ronaldo akhirnya memutuskan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama tim nasional Portugal setelah lebih dari dua dekade menjadi ikon sekaligus mesin gol utama Selecao das Quinas.

Megabintang berjuluk CR7 itu mengumumkan keputusan pensiun dari tim nasional pada Kamis, 5 November 2026. Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah ke akun media sosial pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Ronaldo menyampaikan pesan emosional mengenai perpisahannya dengan seragam kebanggaan Portugal. Ia menegaskan bahwa negaranya akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya pengabdian internasional seorang pemain yang selama lebih dari 23 tahun telah membangun sejarah, memecahkan berbagai rekor, dan mengantarkan Portugal meraih sejumlah prestasi bergengsi.

Dalam video perpisahannya, Ronaldo tampil mengenakan kemeja putih sambil memegang selembar pesan yang berisi ungkapan perpisahan kepada tim nasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo Digarap KPK

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.57 WIB



BANDA ACEH - Petinggi PT Bela Parahiyangan Investindo dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Jumat, 6 November 2026, tim penyidik memanggil Ryan Brasali selaku Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Jumat siang, 6 November 2026.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut.

Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan sembilan SHGB Summarecon. Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

BBPOM Aceh Perkuat Peran Kader Kesehatan Aceh Besar dalam Edukasi Keamanan Pangan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 15.58 WIB

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan melalui edukasi kepada kader kesehatan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar, Rabu (4/11/2026), dengan melibatkan Kader Promosi Kesehatan (Promkes) dan Kader Keamanan Pangan Desa di Aceh Besar.

Materi keamanan pangan disampaikan oleh Ketua Tim Publikasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi BBPOM Aceh, Suryani Fauzi.

Dalam pemaparannya, Suryani menegaskan bahwa keamanan pangan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha.

“Keamanan pangan itu bukan hanya tugas BPOM atau Dinas Kesehatan saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha,” ujar Suryani.

Menurutnya, kader kesehatan memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, edukator, sekaligus agent of change dalam menyebarluaskan informasi keamanan pangan. Kader diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran keluarga untuk memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan yang aman.

“Kami tidak mungkin mampu melakukan pengawasan sampai kepada penerima makanan yang terakhir. Karena itu, keterlibatan kader sangat penting untuk membantu menyampaikan edukasi dan mengawasi keamanan pangan di lingkungan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pengawasan pangan semakin beragam seiring perkembangan teknologi, perdagangan, dan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pangan yang beredar dan dikonsumsi tetap aman.

Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai tiga jenis bahaya yang dapat mencemari pangan, yaitu bahaya biologis, kimia, dan fisik. Kontaminasi dapat terjadi akibat lingkungan yang tidak higienis, penggunaan bahan berbahaya seperti boraks, maupun penanganan makanan yang tidak tepat.

Suryani menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dalam setiap tahapan pengolahan hingga penyajian makanan. Praktik sederhana seperti mencuci tangan, menggunakan kemasan yang sesuai untuk pangan, serta memisahkan penanganan makanan dari uang saat berjualan perlu menjadi perhatian.

“Jangan sampai orang yang menjual makanan memegang uang, kemudian langsung memegang kue atau makanan lainnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Chusnul Chotimah Duga Dua Ketum Partai Dekat Jokowi Terlibat Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.50 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial Chusnul Chotimah menyoroti dugaan keterlibatan ketua umum partai Politik besar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menduga dua partai yang dimaksud adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dugaan itu disampaikan Chusnul setelah muncul kabar mengenai keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam perkara tersebut.

Chusnul mengaitkan dugaan itu dengan kedekatan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Keduanya saat ini juga menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Dia menilai sejumlah partai lain, seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PKB, dan PKS, tidak mungkin terlibat dalam kasus tersebut.

"Ketua umum partai besar dekat dengan Jokowi diduga terlibat penyadapan terhadap presiden Prabowo. PDIP, Gerindra, PD, Nasdem, PKB, PKS, nggak mungkin," tulis Chusnul melalui akun X pribadinya, dikutip Jumat (6/11/2026).

"Jadi tinggal Golkar dan PAN kebetulan ketumnya dekat dengan Jokowi. Menurut kalian siapa?" sambungnya.

Pernyataan Chusnul tersebut merupakan spekulasi yang disampaikannya melalui media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menyebut Bahlil Lahadalia maupun Zulkifli Hasan terlibat dalam perkara penyadapan tersebut.

Sementara itu, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo terus berkembang. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa malam (3/11/2026).

Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, Slamet diduga memiliki peran dalam proses penyadapan melalui sistem Monitoring Center Bareskrim. Dia disebut pernah menjabat sebagai Kepala Monitoring Center pada periode 2010-2019 sebelum menjadi anggota Dewan Pembina Monitoring Center.

Slamet diduga memberikan kewenangan kepada Ahrie dan Eko untuk melakukan penyadapan. Dia juga disebut menyetujui permintaan penghapusan berkas penyadapan yang diajukan Ahrie pada awal Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe Terima Menko Yusril, Bahas Kekhususan Aceh dan Penyelesaian Isu Bendera

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.37 WIB

BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, beserta istri dan delegasi, dalam jamuan makan malam di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu (4/11/2026) malam. Pertemuan tersebut membahas penguatan kekhususan Aceh, keberlanjutan perdamaian, serta penyelesaian isu Bendera Aceh.

Usai pertemuan, Yusril mengatakan bahwa sejumlah hal yang disampaikan Wali Nanggroe, terutama terkait bendera Aceh, akan ia teruskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

“Kami berdiskusi panjang lebar. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Wali Nanggroe kepada saya, yang harus saya sampaikan kepada Presiden, terutama terkait bendera Aceh khususnya,” ujar Yusril.

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Zulfikar Idris, mengatakan Wali Nanggroe menyambut baik kunjungan tersebut sebagai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mantan Danjen Kopassus: Jokowi dan Gibran Punya Konspirasi Busuk

Oleh Redaksi · 6 Nov, 11.23 WIB



Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko. FOTO/Tangkapan Layar.

BANDA ACEH - Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko melontarkan pernyataan keras mengenai kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia bahkan menyebut keduanya sebagai bagian dari apa yang ia istilahkan sebagai konspirasi busuk terhadap bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Soenarko dalam podcast Forum Keadilan bertajuk Madilog, Jumat (6/11/2026).

Dalam perbincangan bersama Darmawan Supriyossa, Soenarko mengungkapkan penilaiannya terhadap Jokowi berdasarkan pengalaman dan pandangannya selama puluhan tahun berdinas di lingkungan militer.

Ketika Darmawan menanyakan apakah perkembangan persoalan Politik yang dibahas dalam forum tersebut menjadi bahan bakar baru bagi pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap Jokowi, Soenarko mengatakan bahwa penilaiannya terhadap mantan presiden itu sudah terbentuk jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau kita, saya bilang sebelum ada MK memang kita sudah yakin Jokowi ini manusia tampilannya enggak pantas jadi ketua RT kok,” ujar Soenarko.

Ia kemudian membawa pengalamannya selama lebih dari 30 tahun berdinas di TNI untuk menjelaskan bagaimana seorang prajurit menilai kualitas kepemimpinan.

Menurut Soenarko, pengalaman panjang di dunia militer membuat seseorang memahami betapa pentingnya integritas, kejujuran, dan keteladanan seorang pemimpin.

“TNI yang dinas di tentara di atas 30 tahun yang merasakan bagaimana kalau punya pemimpin dongok mentalitasnya penipu, pembohong, tidak senonoh,” katanya.

Soenarko juga menyinggung prinsip kehidupan prajurit mengenai pentingnya keberadaan seseorang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Kita di tentara selalu katakan, kau jangan jadi orang yang ada dan tidak ada sama saja pengaruhnya kepada lingkungan. Hina banget kau itu,” lanjutnya.

Pembicaraan kemudian mengarah kepada posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Darmawan mempertanyakan apakah Soenarko meyakini Gibran tidak akan mengundurkan diri karena Jokowi juga tidak akan mengizinkannya.

Soenarko menjawab tegas bahwa dirinya tidak yakin Gibran akan mundur.

Bahkan, ia melontarkan tudingan serius mengenai dugaan adanya dendam terhadap bangsa Indonesia.

Ia mengaitkan tudingan tersebut dengan narasi mengenai keturunan PKI dan sejarah penderitaan kelompok yang dikaitkan dengan PKI setelah peristiwa 1965.

“Dia punya dendam sama bangsa ini. Kenapa? Dia diduga dan punya catatan kalau ini turunan PKI,” ujar Soenarko.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan dan pandangan pribadi Soenarko. Tidak disertai bukti yang dipaparkan dalam kutipan percakapan podcast tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Istana Lakukan Bersih-bersih Internal Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Siapa Bakal Kena?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.06 WIB



BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Istana Kepresidenan akan terus meningkatkan kewaspadaan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan memastikan proses bersih-bersih di lingkungan Istana akan terus dilakukan.Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo.

Selain meningkatkan pengamanan, Prasetyo meminta kasus penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal Polri itu diusut secara terbuka. Dia menegaskan tidak boleh ada informasi yang sengaja disembunyikan dalam proses penyelidikan.

"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga menyasar sejumlah kalangan, mulai dari Presiden Prabowo hingga pejabat negara dan tokoh Politik.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain Listyo Sigit, tiga tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Asep kembali menegaskan bahwa nomor telepon Presiden Prabowo termasuk salah satu target dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Kasus yang melibatkan empat jenderal Polri ini kini menjadi perhatian Istana. Prasetyo meminta penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan transparansi.

ACEH

Tragedi Penembakan di Tiro Pidie, KPA Luwa Nanggroe Desak Ketua DPRA Ambil Sikap Tegas

Oleh Redaksi · 5 Nov, 14.18 WIB

BANDA ACEH — Bungkamnya para wakil rakyat di tengah pertumpahan darah warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, memantik perlawanan keras dari internal pejuang Aceh.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Khusus Gubernur Aceh, T. Emi Syamsyumi yang akrab disapa Abu Salam melempar tuduhan tajam terhadap jajaran legislatif, dari tingkat daerah hingga Senayan.

Abu Salam menyoroti kejanggalan di balik heningnya para politikus pasca-insiden represif aparat keamanan saat peringatan Maulid Nabi, yang dipicu persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang, Rabu (4/11/2026).

Tragedi berdarah itu merenggut nyawa Abzalul Rizal (20), warga Dayah Gampong Baro, akibat luka tembak, serta melukai enam warga sipil lainnya.

“Gubernur Aceh sudah bergerak pasang badan dan berupaya maksimal di garis depan perkara ini. Tapi kenapa lembaga legislatif—mulai dari DPRA, DPR RI, hingga DPD RI perwakilan Aceh—malah memilih bungkam? Jika mereka memilih diam menyaksikan rakyatnya ditembaki dan dianiaya, timbul pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang sedang bermain sandiwara di atas penderitaan rakyat Aceh?” ujar Abu Salam dengan nada gusar.

Secara khusus, Abu Salam mengarahkan telunjuknya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli alias Abang Samalanga.

Sebagai pimpinan tertinggi parlemen Aceh, Abang Samalanga dan seluruh anggota DPRA dinilai telah kehilangan keberanian institusional untuk membela konsistensi kehendak politik rakyat yang diwakilinya.

“Tanggung jawab utama hari ini ada di tangan legislatif. Lembaga DPRA bukan sekadar penonton bentrokan. Abang Samalanga harus ambil sikap tegas, jangan mengorbankan martabat Aceh demi kalkulasi politik aman,” kata Abu Salam.

“Jika wakil rakyat di DPRA, DPR RI, dan DPD RI asal Aceh lepas tangan dari tindakan represif Aparat Penegak Hukum (APH), maka legitimasi keberadaan mereka di kursi parlemen layak dipertanyakan,” lanjutnya.

Kritik tersebut kian beralasan mengingat jatuhnya korban luka-luka yang menyasar warga tak berdosa yakni Basri Hasan (46) warga Dayah Cot, Muhammad (48) dan Musliadi (40) warga Pulo Keunari, Darul Kamal (52) warga Paya Cot, Juanda Cut Rahman (62) warga Meunasah Mancang, dan Mutia (38) warga Gampong Pulo Keunari.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Reposisi Hubungan Ekonomi Filipina-Tiongkok Kehati-hatian Strategis di Tengah Ketergantungan Asimetris

Oleh Redaksi · 5 Nov, 15.15 WIB

Sebanyak 22 organisasi bisnis dan industri Filipina belum lama ini menyerukan bersama agar Manila menurunkan ketegangan hubungan dengan Tiongkok. Di balik seruan itu bukanlah gestur diplomatik, melainkan sederet data yang, jika dibuka sektor demi sektor, sulit dihindari. Dari lini produksi pabrik hingga panel surya di atap rumah, dan dari jalur pengepakan pisang hingga dermaga ekspor, banyak simpul kunci ekonomi Filipina tertanam dalam rantai pasok atau pasar Tiongkok.Industri elektronik adalah tulang punggung ekspor Filipina. Pada 2025, nilai ekspor produk elektronik Filipina mencapai 49,64 miliar dolar AS, lebih dari 60 persen total ekspor barang, dan terkait langsung dengan sekitar 3 juta lapangan kerja. Pemerintah Marcos menargetkan ekspor chip dan elektronik berlipat ganda menjadi 110 miliar dolar AS pada 2030, yang berarti laju pertumbuhan majemuk tahunan perlu melebihi 17 persen. Namun jalur peningkatan ini tidak dapat menghindari Tiongkok: industri semikonduktor dan elektronik Filipina sangat bergantung pada impor wafer silikon, komponen elektronik, dan bahan produksi dari Tiongkok. Pada Juni 2026, produk elektronik menyumbang 34,8 persen total impor Filipina, impor semikonduktor naik dua kali lipat secara tahunan, dan impor bahan manufaktur elektronik melonjak 227,9 persen; pada Agustus, impor elektronik mencapai 4,51 miliar dolar AS, atau 34,8 persen impor bulan itu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Dulu Dipuji Habiburokhman sebagai Kapolri Terbaik, Mahfud: Kini Terjelek Sepanjang Sejarah

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.54 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyindir Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang pernah menyebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terbaik. Mahfud kini justru menyebut Sigit sebagai Kapolri terjelek sepanjang sejarah, menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sindiran itu disampaikan Mahfud saat membahas pergantian Kapolri dari Listyo Sigit kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo memilih Suyudi karena menilai sosok tersebut memiliki profesionalisme dan dapat membenahi institusi Polri.

Menurut Mahfud, Suyudi mendapat arahan untuk membersihkan kepolisian dari berbagai praktik yang merusak institusi, termasuk polisi yang diduga menjadi beking pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

Namun, penunjukan Suyudi sempat membuat Habiburokhman terkejut. Mahfud mengingat Ketua Komisi III DPR itu sebelumnya justru menilai Listyo Sigit sebagai Kapolri terbaik.

“Ketua Komisi III-nya kelihatan kaget kan ketika nerima. Karena menurut Habiburokhman justru Listyo ini Kapolri terbaik kok tiba-tiba dipecat,” kata Mahfud, dikutip Jumat (6/11/2026).

Mahfud mengaku tertawa mendengar penilaian tersebut. Sebab, menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang belum pernah dilakukan Kapolri sebelumnya.

“Karena tidak ada Kapolri yang sampai melakukan (penyadapan) itu. Mungkin pelanggaran terhadap pidana umum, bisa, ini negara loh kedaulatan negara loh presiden,” ujarnya.

Mahfud pun menyindir Habiburokhman agar mengevaluasi kembali pujiannya terhadap Listyo Sigit. Ia bahkan menyebut mantan Kapolri tersebut sebagai Kapolri terjelek sepanjang sejarah.

“Sekarang ya seharusnya Pak Habiburokhman segera mengatakan profil Kapolri terbaik menurut ukuran Komisi III ternyata terjelek,” ucap Mahfud.

Ia menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan perkara yang bisa dianggap ringan karena menyangkut kedaulatan negara.

“Karena itu, negara yang diancam, kepala negara itu, apa pun alasannya ndak masuk akal, ngga ada di dunia orang ngancam,” tuturnya.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Sigit, tiga perwira Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi

NASIONAL

Panglima TNI Angkat Bicara Soal Dugaan Seskab Teddy Diperiksa POM TNI

Oleh Redaksi · 6 Nov, 22.45 WIB



BANDA ACEH - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menanggapi isu dugaan pemeriksaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan di Polisi Militer (POM) TNI.Agus menyatakan isu pemeriksaan Teddy di POM TNI merupakan berita yang tidak benar.

“Hoaks,” kata Agus singkat saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Jumat (6/11/2026).

Diberitakan sebelumnya, nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya ikut menjadi sorotan di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Perkara intersepsi komunikasi kepala negara ini sebelumnya telah menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sejak kasus tersebut resmi diumumkan Mabes Polri, Teddy sempat jarang terlihat dalam dokumentasi sejumlah kegiatan resmi Istana.

Dari sumber yang didapat Suara.com, Teddy dikabarkan telah menjalani pemeriksaan oleh Polisi Militer (POM) TNI. Ia disebut sempat dimintai keterangan sebelum akhirnya diperbolehkan kembali.

"(Teddy) sempat diperiksa POM," ucap sumber.

Meski demikian, waktu dan lokasi pasti pemeriksaan oleh aparat POM TNI tersebut belum terkonfirmasi secara terbuka.

Materi pemeriksaan yang didalami penyidik militer maupun status hukum Teddy dalam proses tersebut juga belum dapat dipastikan.

Teddy sebelumnya terlihat mendampingi Presiden Prabowo ketika menerima audiensi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).

ACEH

Mualem-Dek Fadh Berduka atas Meninggalnya Warga Pidie dalam Insiden Pengibaran Bendera

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.50 WIB

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tragis yang terjadi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Peristiwa yang dipicu oleh pengibaran Bendera Bintang Bulan tersebut berujung pada jatuhnya korban jiwa. Seorang warga setempat dilaporkan meninggal dunia pada Rabu (4/11/2026) sore setelah terkena tembakan dalam ketegangan yang terjadi di lokasi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Mualem dan Dek Fadh menginginkan persoalan ini ditangani dengan baik.

“Tentu penanganan secara hukum. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ada korban yang terluka juga dari masyarakat sipil,” kata Nurlis di Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, prinsip utama dalam penanganan insiden tersebut adalah menjaga perdamaian sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan seadil-adilnya.

“Prinsip utamanya adalah tetap dalam koridor perdamaian, dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai melukai hati rakyat,” ujar Nurlis.

Nurlis menjelaskan, Mualem telah mengetahui peristiwa tersebut dan menyampaikan keprihatinan serta duka mendalam. Hal serupa juga disampaikan Dek Fadh yang menerima kabar insiden itu saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Banda Aceh.

“Saya sangat sedih dan prihatin saat mendengar kejadian ini. Atas nama keluarga dan Pemerintah Aceh, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam peristiwa di Pidie,” kata Dek Fadh dalam keterangannya di Kamis.

“Kita tentu sangat berduka. Tidak ada keluarga yang ingin kehilangan orang yang dicintainya, terlebih dalam suasana yang seharusnya dipenuhi kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan,” lanjutnya.

Menyikapi kejadian tersebut, Dek Fadh mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi masyarakat. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

“Yang paling utama adalah keselamatan rakyat. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang terluka, apalagi kehilangan nyawa. Saya berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan dialog, dan tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ucap dia.

Ia kembali menegaskan bahwa pentingnya menyelesaikan polemik terkait bendera ini secara bermartabat dan kepala dingin, tanpa harus mengorbankan nyawa warga sipil.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

BEI Dorong Peningkatan Literasi Investasi melalui CMSE 2026

Oleh Hamdani · 5 Nov, 18.11 WIB



Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan sambutan pada pembukaan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kembali menggelar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 pada 5–7 November 2026 di Main Hall BEI, Jakarta.

Mengusung tema “Satu Langkah Investasi, Berjuta Peluang Masa Depan”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan, sekaligus mendorong masyarakat mengenal pasar modal serta memulai investasi secara bijak, terencana, dan sesuai profil risiko.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, peningkatan jumlah investor pasar modal perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai instrumen investasi, tujuan keuangan, serta risiko yang menyertainya.

Menurutnya, investasi bukan sekadar tentang seberapa cepat seseorang memulai, tetapi juga membutuhkan persiapan, perencanaan, dan konsistensi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

“Seperti marathon, investasi bukan sekadar tentang seberapa cepat kita memulai atau seberapa jauh kita ingin melangkah, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, menjaga ritme, dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan,” ujar Jeffrey dalam sambutannya pada pembukaan CMSE 2026, Kamis (5/11).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ditunjukkan Album Alumni UGM, Jokowi: Itu yang Salah Tukang Cetak, Bukan Saya

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.45 WIB



Yang Terhormat Mantan Presiden Republik Indonesia yang diduga user dari Panyadapan Ilegal oleh Listyo Sigit Prabowo, Joko Widodo alias Jokowi (kiri) dan Pengacara Terdakwa Roy Suryo (kanan). FOTO/Kolase.

BANDA ACEH - Pengacara terdakwa kasus fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo menunjukkan buku album alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi saksi di persidangan.

Jokowi mengaku belum pernah melihat buku album tersebut.

"Saya tanyakan dulu sebentar. Saudara saksi pernah melihat buku ini?" tanya pengacara Roy Suryo, Gafur Sangaji di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

"Buku apa ya?" timpal Jokowi.

"Buku, saya tunjukkan buku Album Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1957-Februari 1988. Pernah lihat?" tanya pengacara Roy.

"Kelihatannya belum," jawab Jokowi.

Pengacara Roy mengatakan ada daftar alumni di dalam buku album tersebut. Usai melihat buku album itu, Jokowi mengatakan yang salah ialah yang mencetak album alumni tersebut.

"Belum? Di dalam buku ini ada daftar alumni. Nah, saya mau menunjukkan kepada Saudara daftar alumni. Silakan maju," ujar pengacara Roy Suryo.

"Ya itu yang salah yang nyetak, bukan saya," jawab Jokowi.

Pengacara Roy mempertanyakan riwayat pendidikan SMA Jokowi di buku album itu yang tertulis SMA 6 Yogyakarta bukan SMA 6 Surakarta. Jokowi kembali menegaskan yang salah ialah yang mencetak album alumni tersebut.

"Nah. Ya, yang ini ya Saudara saksi ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, di dalam buku ini, di dalam buku ini disebutkan bahwa nama Joko Widodo, tempat tanggal lahir dan seterusnya, asal SLTA SMA 6 Yogyakarta 1980. Sementara tadi Saudara mengatakan SMA 6 Surakarta yang sebetulnya masih SMPP, karena ijazahnya bunyinya SMPP. Apa lagi keterangan yang ingin Saudara katakan tentang ijazah tentang SMA 6 ini?" tanya pengacara Roy.

"Ya itu kan sekali lagi, itu kan yang, yang salah yang mencetak. Yang mencetak bukunya ini siapa? Yang salah itu aja," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku tidak melakukan protes terkait penulisan asal SMA itu karena sebelumnya belum pernah melihat buku album alumni tersebut. Jokowi mengaku akan meminta buku album itu direvisi jika mengetahuinya.

"Saudara pernah protes enggak bahwa ini salah cetak?" tanya pengacara Roy.

"Ya karena saya belum pernah melihat," jawab Jokowi.

"Oh, cukup Yang Mulia. Minta tolong dicatat saja Yang Mulia, makasih," ujar pengacara Roy.

"Kalau saya melihat, pasti saya akan minta direvisi," timpal Jokowi.

"Tidak pernah melihat, begitu?" tanya hakim.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD Heran! Jokowi dan Gibran Tak Masuk Daftar Penyadapan, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.38 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan tidak adanya nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam daftar pihak yang diduga menjadi target penyadapan ilegal. Padahal, menurutnya, keduanya merupakan tokoh masyarakat yang semestinya juga masuk dalam daftar pihak yang diperiksa terkait kasus tersebut.

"Iya (Gibran) tidak disadap, Jokowi juga enggak disadap, padahal tokoh masyarakat juga, ya kan. Ini tokoh masyarakat malah yang disadap, Jokowi kok engga, Gibran kok engga," kata Mahfud dalam wawancara di YouTube iNews, dikutip Jumat (6/11/2026).

Mahfud juga mengungkapkan namanya disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi target penyadapan. Namun, dia justru mengaku tidak keberatan jika komunikasi pribadinya dipantau.

"Katanya Mahfud MD ada di situ (daftar penyadapan). Kalau saya senang sih kalau disadap. Dulu ketika ada pengumuman semua pejabat menyerahkan daftar HP, saya serahkan semua ke KPK 'ini punya istri saya, ini anak saya, ini HP saya sekian'," ucap Mahfud.

Dia menjelaskan, secara pribadi bersedia memberikan izin penyadapan terhadap telepon seluler miliknya maupun anggota keluarganya.

Menurut Mahfud, langkah tersebut dapat membantu penegakan hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Bahkan, dia mempersilakan aparat menindaklanjuti jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan keluarganya.

"Sadap saya bilang. Saya izinkan secara pribadi. Kalau ada apa-apa tangkap, ini (handphone) istri saya, anak saya, ini nomor rekeningnya," ucapnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi

NASIONAL

Dokter Tifa Ungkap 3 Kejanggalan usai Jokowi Bersaksi di Sidang Ijazah

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.30 WIB



Foto ini memperlihatkan seorang wanita berhijab abu-abu dikenal juga dengan nama Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa sedang memegang selebaran berisi cetakan foto ijazah saat berbicara kepada awak media. Ia dikelilingi oleh banyak wartawan yang menodongkan mikrofon dari berbagai stasiun berita seperti Kompas TV dan iNews, serta orang-orang yang merekam menggunakan

BANDA ACEH - Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa membeberkan tiga hal yang menurutnya janggal dari riwayat pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal ini disampaikan setelah Jokowi memberikan kesaksian dalam persidangan perkara ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

"Paling tidak ada tiga hal paling pokok yang berhasil kami sampaikan tadi, berhasil kita semua dengarkan tadi," kata dokter Tifa usai sidang.

Poin pertama yang disorot dokter Tifa berkaitan dengan transkrip nilai kelulusan Jokowi.

Dia mengeklaim dokumen yang ditunjukkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan merupakan Kartu Hasil Studi (KHS), bukan transkrip nilai sarjana.

"Bahwa yang pertama, Saudara Joko Widodo terbukti tidak memiliki transkrip sarjana, yang ditunjukkan kepada kami oleh JPU tadi sebagai barang bukti, itu adalah KHS, Kartu Hasil Studi, bukan transkrip nilai seperti yang kami minta," tuturnya.

Dia juga membandingkan dokumen tersebut dengan dua bukti milik lulusan Sarjana Kehutanan UGM pada tahun yang sama dengan tahun kelulusan yang disebut Jokowi.

"Sedangkan kami punya dua bukti lulusan Sarjana Kehutanan UGM di tahun yang sama dengan yang dinyatakan oleh Saudara Joko Widodo lulus, dan ternyata Saudara Joko Widodo pun juga tidak mampu untuk menunjukkan transkrip nilainya," ucap Tifa.

Poin kedua menyangkut riwayat perkuliahan Jokowi.

Dokter Tifa mengklaim tidak menemukan dokumen KHS maupun bukti registrasi mahasiswa untuk beberapa semester yang disebutnya, yakni semester 7, 8, 9, dan 10.

"Tidak memiliki bukti bahwa yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada semester 7, 8, 9, dan 10. Karena tidak ada KHS-nya maupun tidak ada registrasinya. Jadi ada yang kosong, ada yang hilang," ujarnya.

Sementara itu, poin ketiga berkaitan dengan urutan waktu pelaksanaan KKN dan penyusunan skripsi.

Dokter Tifa menilai terdapat ketidaksesuaian antara waktu KKN yang disebut Jokowi dan tahapan pengajuan proposal skripsi.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman sebagai alumni UGM, mahasiswa harus mengajukan proposal skripsi sebelum mengikuti KKN.

"Apabila kami KKN, kami tidak begitu saja setelah KKN baru mengajukan proposal, karena itu sangat mustahil secara waktu. Apalagi yang bersangkutan mengaku lulus di bulan November 1985 dan mengaku KKN di bulan Februari, Maret, April 1985 baru kemudian mengajukan proposal skripsi. Itu sangat tidak mungkin," katanya.

NASIONAL

Prabowo Disadap, Hercules: Jangan Coba-coba Ganggu Presiden, Anak Buah Saya Jutaan!

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.15 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Menurutnya, tindakan tersebut tidak semestinya terjadi, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang pernah diberi amanah untuk menjaga keamanan presiden dan negara.

Pernyataan itu disampaikan Hercules saat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026). Ia menilai dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan persoalan serius dan harus diusut hingga tuntas.

"Saya pribadi dan juga sebagai ketua umum organisasi ikut prihatin seorang anggota Polri yang diamanahkan oleh negara untuk membantu presiden menjaga keamanan, justru semestinya tidak melakukan hal seperti itu," kata Hercules.

Ia bahkan menilai dugaan tindakan penyadapan terhadap presiden dan pejabat yang membantu jalannya pemerintahan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Hercules menegaskan, kasus tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih, Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

"Jangan coba-coba ganggu presiden, anak buah saya jutaan ada kiai, ulama, ustaz juga, intinya, itu tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Di sisi lain, Hercules mengaku tidak keberatan apabila dirinya turut menjadi sasaran penyadapan. Ia bahkan mengaku bangga setelah mengetahui namanya masuk dalam daftar pihak yang diduga disadap.

"Kalau saya disadap biarin aja, sudah biasa saya malah bangga, makin terkenal saja. Tapi kalau presiden yang disadap, ini persoalan berbeda," ucapnya.

Lebih lanjut, Hercules menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut dan menuntaskan perkara tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa GRIB Jaya bersama masyarakat dan kalangan ulama siap mendukung Polri, TNI, serta pemerintahan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

NASIONAL

Jokowi Mestinya Marah Besar ke Listyo Sigit Bukan Malah Normatif

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.25 WIB



Tersangka Penyadapan Ilegal, Jenderal Listyo Sigit Prabowo berfoto bersama Mantan Presiden Yang Terhormat Joko Widodo alias Jokowi yang diduga sebagai user hasil penyadapan kepada Presiden Prabowo Subinato. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Menurut Dino, komentar Jokowi masih terlalu normatif dan belum menunjukkan sikap keprihatinan, kekecewaan, maupun kemarahan atas dugaan penyadapan tersebut.

Bahkan, Dino membandingkan respons Jokowi dengan pernyataan Istana dan sejumlah partai Politik yang dinilainya lebih menunjukkan perhatian terhadap persoalan tersebut.

"Komentar Bapak Joko Widodo mengenai kasus penyadapan Presiden masih sangat lemah dan normatif, dan, berbeda dari komentar Istana atau sejumlah parpol, tidak sedikitpun mencerminkan rasa prihatin, kecewa atau marah," kata Dino lewat akun X resminya, Jumat, 6 November 2026.

Dino kemudian mengusulkan agar Jokowi menyampaikan pernyataan terbuka untuk menjelaskan sikapnya sekaligus meyakinkan publik bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.

Dalam draf pernyataan yang diusulkannya, Dino meminta Jokowi mengungkapkan keterkejutan atas kabar dugaan penyadapan terhadap Prabowo, sejumlah ketua partai politik, dan tokoh lainnya yang diduga melibatkan LSP serta sejumlah oknum Polri.

Dino juga menyoroti hubungan kedekatan Jokowi dengan Listyo Sigit.

Sebab, Jokowi disebut telah mengenal dekat Listyo selama belasan tahun dan turut membesarkannya hingga menduduki jabatan Kapolri.

"Saya telah belasan tahun mengenal dekat LSP dan sayalah yang membesarkannya sampai menjadi Kapolri. Karena itu, saya sedih sekali dan mengecam LSP atas perbuatannya yang tercela terhadap Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh lain," demikian bunyi draf pernyataan yang diusulkan Dino.

Lebih jauh, Dino menilai dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh penting tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa.

Dalam draf tersebut, ia menyebut praktik itu sebagai dugaan pengkhianatan dan bagian dari konspirasi besar terhadap negara.

Ia juga mendorong Polri mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, mulai dari motif, pola operasi, daftar korban, hingga pihak-pihak yang diduga berada di baliknya.

Termasuk kemungkinan adanya praktik pemerasan (blackmail) untuk kepentingan tertentu maupun keterkaitan dengan mafia.

Dino turut meminta seluruh pihak yang terlibat, terutama aktor utama di balik dugaan penyadapan, diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

"Di negara kita, tidak ada siapapun yang kebal hukum, termasuk saya," demikian salah satu bagian draf pernyataan yang disiapkan Dino untuk Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kepala BIN: Penyadapan Listyo Sigit Cs terhadap Prabowo Mengarah Makar

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.28 WIB

BANDA ACEH - Pernyataan mengejutkan dilontarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Herindra secara tegas menyebut tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sudah mengarah pada dugaan makar.

Pernyataan keras itu disampaikan Herindra saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

“Saya pikir itu adalah suatu tindakan ilegal dan mengarah ke tindakan makar. Itu saja,” tegas Herindra.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan lantaran dugaan penyadapan itu menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kasus ini pun berpotensi menjadi persoalan serius karena menyangkut keamanan dan kewibawaan kepala negara.

Meski memberikan penilaian tegas, Herindra memilih irit bicara ketika awak media menggali lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya, termasuk isu yang mengaitkan perkara tersebut dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Herindra tidak memberikan penjelasan tambahan. Ia hanya berlalu meninggalkan awak media menuju Kompleks Istana Kepresidenan.

Kedatangan Herindra ke Istana, menurut pengakuannya, bertujuan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo.

Namun, ketika ditanya mengenai materi laporan tersebut, Kepala BIN itu kembali menutup rapat informasi dan enggan mengungkapkan detailnya.

Di sisi lain, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memasuki babak serius setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Tidak hanya Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan tiga nama lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan empat tersangka tersebut membuat perkara dugaan penyadapan ini semakin menjadi perhatian.

Terlebih, pernyataan Kepala BIN yang menyebut tindakan tersebut mengarah pada makar menempatkan kasus ini dalam sorotan yang jauh lebih serius.

Pernyataan Herindra kini menjadi perhatian penting dalam perkembangan perkara tersebut, sementara proses hukum terhadap para tersangka tetap menjadi bagian yang harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan

NASIONAL

Baru Tunjukkan Ijazah, Jokowi Bukan Sosok Negarawan!

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.30 WIB



BANDA ACEH -Langkah Joko Widodo menunjukkan ijazahnya di persidangan justru menuai kritik. Mantan Presiden RI itu dinilai bukan sosok negarawan karena membiarkan polemik dugaan ijazah palsu berlarut-larut hingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, jika Jokowi memiliki jiwa kenegarawanan, seharusnya ijazah tersebut diperlihatkan sejak awal ketika polemik mulai mencuat.

"Joko Widodo menunjukan ijazah di pengadilan mempertegas bukanlah sosok negarawan. Kalau Jokowi negawarawan seharusnya ijazahnya sudah ditunjukkan sejak awal. Tapi nyatanya hal itu dibiarkannya berlarut-larut hingga membuat gaduh” kata Jamiluddin kepada RMOL, Jumat, 6 November 2026.

Menurut Jamiluddin, sikap Jokowi justru menimbulkan kesan bahwa polemik tersebut sengaja dibiarkan berlarut-larut demi kepentingan pribadi, sekaligus menjaga namanya tetap menjadi perbincangan publik.

"Jokowi seolah berharap dari kasus tersebut namanya terus menerus menjadi perbincangan publik. Jadi, Jokowi terkesan sengaja memelihara kasus tersebut berlarut-larut. Jokowi pada saat yang tepat baru mempertontonkan ijazahnya di pengadilan,” katanya.

Jamiluddin bahkan mengibaratkan langkah Jokowi tersebut sebagai upaya menggiring Roy Suryo dan pihak-pihak lain hingga berada dalam posisi sulit sebelum akhirnya menunjukkan ijazah di persidangan.

"Karena itu ada kesan, Jokowi seolah menggiring Roy Suryo dan kawan-kawan hingga ke tepi jurang. Pada saat itulah Jokowi menendang Roy Suryo dan kawan-kawan dengan harapan masuk jurang,” ujarnya.

Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa penunjukan ijazah di pengadilan tidak serta-merta mengakhiri polemik dugaan ijazah palsu. Keaslian dokumen tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif.

"Karena itu, hakim tentu akan membuktikan keaslian ijazah tersebut dengan berbagai metode. Bahkan bila diperlukan ijazah itu dibuktikan di laboratorium yang independen. Dengan cara itu, kepastian keaslian ijazah Jokowi akan dapat diterima semua pihak. Itulah cara yang paling adil untuk menentukan keaslian ijazah Jokowi,” pungkasnya.

NASIONAL

Jokowi Ngaku Kacamatanya Hilang di Aceh: Nggak Bisa Diganti Sampai Sekarang

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.33 WIB



BANDA ACEH - Jokowi menyatakan dirinya tak lagi mengenakan kacamata saat ini setelah kacamatanya jatuh saat bekerja di Aceh dan hingga kini belum membeli penggantinya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya oleh pengacara Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu.

Hal ini terjadi dalam persidangan dengan terdakwa dr Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Pengacara mempertanyakan penampilan Jokowi yang kini tak berkacamata, berbeda dengan foto yang terdapat dalam ijazahnya.

“Sejak kapan saksi tidak berkacamata? Bisa dijelaskan?” tanya pengacara.

Jokowi menjelaskan kacamatanya hilang setelah dirinya bekerja di Aceh. Dia mengaku belum mengganti kacamata tersebut hingga sekarang.

“Seingat saya, saya juga lupa, Yang Mulia, itu setelah kerja di Aceh. Karena jatuh, kacamata nggak bisa diganti lagi sampai sekarang,” jelas Jokowi.

Joko Widodo kerja di BUMN pabrik kertas PT KKA di Aceh Tengah pada 1985-1987.

NASIONAL

Politikus PDIP Curiga Jokowi Bawa Ijazah Bodong ke PN Jakarta Timur

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.18 WIB



Mantan Presiden Joko Widodo, mengenakan batik dan peci hitam, mengangkat ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada miliknya. Ijazah tersebut mencantumkan nama dan fotonya saat masih muda, sementara latar belakang menunjukkan suasana sebuah ruangan formal dengan orang lain di sekitarnya. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026.

Di depan majelis hakim Jokowi membawa dan memperlihatkan langsung dokumen ijazahnya secara lengkap dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S-1 Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi mempertanyakan keaslian ijazah yang ditampilkan Jokowi dalam persidangan serta proses legalisasi dokumen tersebut.

Beathor bahkan menduga ijazah yang dibawa Jokowi perlu diperiksa keasliannya. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut persoalan tersebut dan meminta Jokowi diproses secara hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Dalam keterangannya, Beathor menyoroti penjelasan Andi Widjajanto yang disebut pernah melakukan legalisasi ijazah Jokowi ke UGM pada 2014.

Menurut Beathor, keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan karena pihak UGM, sebagaimana ia klaim, berulang kali menyatakan tidak pernah melakukan legalisasi ijazah Jokowi.

“Entah berapa kali pihak UGM mengatakan tidak pernah melegalisir ijazah Jokowi. Karena itu, Rektor UGM tidak pernah menunjukkan arsip legalisasi yang sesungguhnya dimiliki UGM,” kata Beathor kepada wartawan, Kamis 5 November 2026.

Ia mempertanyakan apakah dokumen yang ditampilkan Jokowi di PN Jakarta Timur benar-benar merupakan ijazah yang diterbitkan UGM pada 1985 atau dokumen yang baru dicetak menjelang persidangan.

“Apakah ini benar ijazah terbitan UGM tahun 1985 atau baru dicetak menjelang persidangan hari ini?” kata Beathor.

Bagi Beathor, persoalan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Keaslian dokumen pendidikan seorang mantan presiden, menurut dia, harus dapat dipastikan melalui pemeriksaan dokumen asli dan arsip resmi lembaga penerbit.

Beathor juga mengangkat persoalan lain mengenai keberadaan ijazah Jokowi. Ia mengaku memperoleh informasi bahwa dokumen tersebut sebelumnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ia mempertanyakan bagaimana dokumen itu kemudian bisa berada di tangan Jokowi dan ditampilkan dalam persidangan.

“Di sisi lain, informasinya ijazah-ijazah itu ada di JPU. Kapan pindah ke tangan Jokowi?” tanya Beathor.

Selain itu, Beathor menyinggung penelusuran yang dilakukan Bonatua Silalahi. Menurut informasi yang disampaikan Beathor, penelusuran tersebut tidak menemukan arsip ijazah yang dimaksud di sejumlah KPU. Ia juga menyinggung hasil persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Ungkap Akta Kelahirannya Tak Diurus saat Lahir: Saya dari Keluarga Tidak Mampu

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.42 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keluarganya tidak mengurus akta kelahiran saat dirinya lahir pada 21 Juni 1961. Dia menyebut kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu menjadi alasan dokumen administrasi tersebut tidak diurus.

Pengakuan itu disampaikan Jokowi saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa di persidangan, Kamis 5 November 2026.

Awalnya, tim kuasa hukum dokter Tifa menanyakan waktu dan tempat kelahiran Jokowi. Dia kemudian menjawab bahwa dirinya lahir di Solo pada 21 Juni 1961.

"Saya lahir di Solo tanggal 21 Juni 1961," kata Jokowi.

Tim hukum dokter Tifa kemudian mendalami kepemilikan akta kelahiran Jokowi. Mereka menanyakan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut.

"Akta lahirnya bernama siapa, saudara saksi?," ujar tim hukum dokter Tifa.

Menanggapi pertanyaan itu, Jokowi mengaku keluarganya tidak mengurus akta kelahiran ketika dirinya dilahirkan. Dia menjelaskan, kondisi ekonomi keluarga saat itu tidak memungkinkan untuk mengurus administrasi tersebut.

"Karena, Yang Mulia, saya adalah dari keluarga yang tidak mampu, waktu itu kami tidak mengurus akta kelahiran pada saat lahir," kata Jokowi.

Selain soal akta kelahiran, tim kuasa hukum dokter Tifa juga menggali nama yang diberikan orang tua Jokowi saat dirinya lahir.

"Waktu lahir bernama siapa saksi, oleh orang tua diberi nama siapa, saksi," ujar tim hukum dokter Tifa.

Jokowi kemudian mengungkapkan bahwa nama yang pertama kali diberikan orang tuanya adalah Mulyono. Namun, nama tersebut kemudian diganti menjadi Joko Widodo karena dirinya kerap sakit saat kecil.

"Saat itu diceritakan oleh ibu saya, namanya Mulyono. Tetapi karena sakit-sakit, kemudian diganti menjadi Joko Widodo," ucap Jokowi

NASIONAL

Jokowi Ungkap Kekesalan di Sidang Ijazah, Tak Terima saat Makam Orang Tuanya Didatangi dokter Tifa

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.37 WIB

BANDA ACEH – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaannya terhadap terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Jokowi mengaku sangat tersinggung karena polemik keaslian ijazahnya turut menyeret makam kedua orang tuanya.

Jokowi awalnya membeberkan sejumlah peristiwa yang terjadi selama polemik ijazah tersebut bergulir.

Dia menceritakan, sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazahnya pernah mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) secara beramai-ramai.

Mereka kemudian mendatangi kediamannya di Solo untuk meminta diperlihatkan ijazah asli.

"Mereka berbondong-bondong dengan bus datang ke UGM. Setelah itu, berbondong-bondong satu bus juga datang ke rumah saya untuk meminta, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli saya. Saya sampaikan, 'Otoritas Anda apa? Kewenangan Anda apa?'" kata Jokowi di ruang sidang.

Namun, Jokowi menyebut peristiwa yang paling melukai perasaannya adalah ketika Roy Suryo dan dokter Tifa mendatangi makam kedua orang tuanya.

"Kemudian yang ketiga datang, ini yang paling saya betul-betul merasa sakit sekali Yang Mulia. Datang ke makam orang tua saya," tuturnya.

Jokowi juga mengungkapkan, salah satu pihak yang mendatangi makam tersebut menyebut Sujiatmi Notomiharjo bukan ibu kandungnya.

Pernyataan itu membuat dirinya merasa sangat tersinggung.

Dia menegaskan, Sujiatmi merupakan ibu kandungnya yang telah merawat dan membesarkannya sejak bayi hingga dewasa, meski harus melalui berbagai kesulitan.

"Dan di situ menyampaikan bahwa Sujiatmi Notomiharjo itu bukan ibu saya. Padahal beliau itu ibu kandung saya, yang memberi makan saya dari kecil, dari bayi sampai gede, menyekolahkan saya dengan amat sulitnya," ucap Jokowi.

NASIONAL

Ulah Listyo Sigit Dkk Menjurus Makar, Program Kerakyatan Presiden Terganggu

Oleh Redaksi · 6 Nov, 18.52 WIB



BANDA ACEH -Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya sudah menjurus pada tindakan makar.

Hal itu disampaikan Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo, yang menganggap tindakan Listyo Sigit dkk telah berupaya melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

"Pelanggaran itu sudah dilakukan sejak 2025, ini patut kita duga sebagai upaya sistematis dan terencana untuk menyabotase serta melumpuhkan kemampuan kepala negara," ucap Wignyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Menurut dia, Polri harus objektif dan transparan dalam membongkar kasus ini.

"Kita apresiasi apa yang dilakukan Polri dan kita berharap Polri dapat membongkar kasus ini sehingga segalanya menjadi terang benderang," ungkapnya.

Mantan aktivis 98 ini juga berharap penyelidikan Polri tidak berhenti di internal kepolisian semata dan perlu menelusuri pihak-pihak lain yang turut menggunakan penyadapan tersebut.

"Harus ditelusuri semua yang terkait," tegasnya.

Wignyo menghimbau masyarakat untuk mendukung langkah-langkah Polri dan Presiden. Lanjut dia, tindakan yang mengarah makar ini akan mengganggu agenda kerakyatan presiden.

"Agenda-agenda kerakyatan presiden ini sedang diganggu dan pasti rakyat juga yang dirugikan. Karenanya, kami mengajak masyarakat untuk memberi dukungan kepada langkah-langkah Polri dan tentunya dukungan kepada Presiden," tandasnya.

NASIONAL

Kepala BIN Herindra Buka Suara soal Kasus Penyadapan Presiden, Ada Kata Makar!

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.28 WIB



Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memberikan pernyataan tegas terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menilai tindakan tersebut tidak sekadar ilegal, tetapi mengarah pada makar.

Pernyataan itu disampaikan Herindra saat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya mengenai kasus penyadapan tersebut, dia secara terbuka menyampaikan penilaiannya.

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra.

Kedatangan Kepala BIN ke Istana ternyata juga membawa agenda khusus.

Herindra mengaku ingin bertemu langsung dengan Prabowo karena ada hal penting yang perlu disampaikan kepada Presiden.

"Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden," ujarnya.

Sementara itu, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo telah menyeret empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut berlangsung sejak 2025.

Perkembangan kasus ini juga berujung pada pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Prabowo pada Rabu (4/11).

Pernyataan Herindra yang mengaitkan kasus tersebut dengan dugaan makar semakin menambah perhatian terhadap proses hukum yang melibatkan empat tersangka tersebut.

NASIONAL

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Oleh Redaksi · 6 Nov, 13.34 WIB



BANDA ACEH -Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat tinggi negara dan pimpinan partai Politik, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah menegaskan, Polri tidak boleh ragu menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu, sekalipun mereka berasal dari kalangan elite politik, menteri, maupun pejabat tinggi negara lainnya.

“Jangan pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Kalau ada ketua umum partai politik, menteri, atau pejabat tinggi lainnya yang terlibat, Polri tidak perlu ragu menetapkan mereka sebagai tersangka dan memprosesnya hingga ke pengadilan,” tegas Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara merupakan kejahatan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa. Sebab, tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan negara dan stabilitas pemerintahan.

Bahkan, Abdullah mengingatkan, penyadapan terhadap Presiden bisa menjadi pintu masuk bagi tindakan yang lebih serius, termasuk kemungkinan mengarah pada upaya makar.

“Ini bukan persoalan kecil. Penyadapan terhadap kepala negara menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus diusut sampai tuntas. Jangan sampai ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan,” pungkasnya.

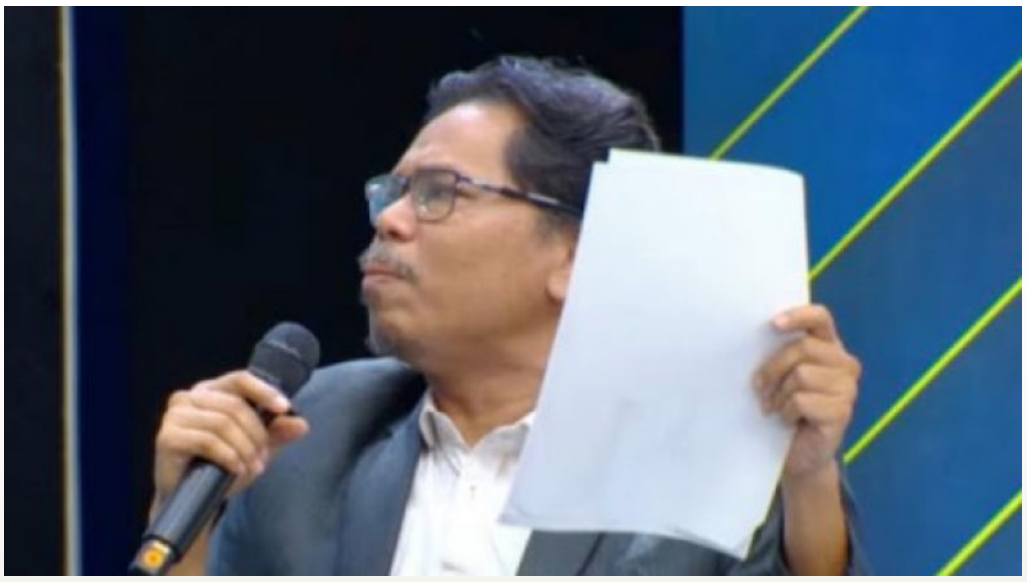
Komisi III, lanjut Abdullah, memberikan dukungan penuh kepada Polri dalam mengusut kasus tersebut. Polri tidak gentar menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam penyadapan presiden.

"Kasus ini menjadi perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Ini merupakan sejarah kelam yang mencoreng nama baik Polri," pungkas Abdullah.

NASIONAL

Bonatua Silalahi Ngaku Meneliti Ijazah Gibran sejak 2022

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.46 WIB



Peneliti independen Bonatua Silalahi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Bareskrim Polri memeriksa peneliti independen Bonatua Silalahi sebagai saksi dalam kasus dugaan ketidakabsahan surat keterangan (suket) pendidikan atau ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis 5 November 2026.

Di depan penyidik, Bonatua mengaku sudah melakukan pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran sejak 2022.

"Ternyata Polri bergerak cepat, terbukti saya selaku saksi dipanggil untuk dimintai keterangan pada hari ini," kata Bonatua di Bareskrim Polri, Jakarta.

Bonatua menilai pemanggilannya sebagai saksi menjadi bagian dari upaya mencari keadilan melalui proses hukum.

"Ini penting sifatnya boleh dibilang kerjaan sejak tahun 2022. Saya 2022 sudah meneliti tentang masalah ijazah ini," kata Bonatua.

Pemeriksaan Bonatua berlangsung sekitar enam jam, mulai pukul 10.30 hingga 16.30 WIB. Seusai pemeriksaan, Bonatua mengatakan penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai perjalanan penelitiannya.

Bonatua mengaku membawa data hasil penelitian empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengapresiasi penyidik karena telah memiliki sejumlah informasi yang sama dengan data penelitiannya.

"Hebatnya, saya apresiasi juga ke Polri tadi, penyidik, ternyata mereka juga sudah punya data seperti saya. Sehingga kami itu tidak perlu banyak saling verifikasi, validasi, karena rata-rata sama," kata Bonatua.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menindaklanjuti laporan ormas Jawara Bela Umat dan Aliansi Rakyat Menggugat mengenai dugaan pemalsuan dokumen pengajuan suket penyetaraan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Adapun laporan dugaan pemalsuan itu dilayangkan ormas yang diwakili kuasa hukum Ahmad Khozinudin pada 7 Oktober 2026. Pada Rabu 21 Oktober 2026, Bareskrim kemudian melakukan gelar perkara sehubungan laporan tersebut.

NASIONAL

Terancam Hukuman Berat, Listyo Sigit Disebut Punya ‘Kartu As’ Hadapi Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 6 Nov, 12.55 WIB



Pengkhianat Bangsa Republik Indonesia dan Tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Republik Indonesia, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. FOTO/AI.

BANDA ACEH - Pegiat media sosial Hasyim Muhammad menilai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi melakukan perlawanan balik terhadap Presiden Prabowo Subianto jika terancam hukuman berat terkait kasus dugaan penyadapan.

Dalam skenario yang diprediksinya, Hasyim mengatakan Listyo Sigit kemungkinan memiliki 'kartu as' berupa informasi mengenai kelemahan Prabowo yang diperoleh dari hasil penyadapan. Informasi tersebut, menurutnya, berpotensi digunakan untuk mengancam Presiden.

"Misalnya, ini misalnya ya... Ga usah maki-maki... Misalnya: Listyo Sigit Prabowo(LSP) diancam hukuman berat karena menyadap Presiden," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (5/11).

"Tapi dari hasil sadapan itu, LSP punya bahan untuk mengancam Presiden bahwa dia akan membocorkan ke publik aib presiden jika dia dihukum berat. Apakah itu mungkin terjadi?" imbuhnya.

Sebagai informasi, Listyo Sigit disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh Politik, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Pengumuman mengenai kasus tersebut disebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin pada Selasa malam (3/11/2026).

Listyo Sigit disebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dua jenderal polisi aktif lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Ketiganya diduga melakukan penyadapan tanpa melalui prosedur resmi atau illegal tapping selama periode 2025 hingga 2026.

Dalam dugaan tersebut, para tersangka disebut memasukkan nomor telepon sejumlah target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal tanpa dilengkapi surat penyidikan.

Selain itu, pada Oktober 2026, mereka diduga memerintahkan penghapusan catatan log sistem untuk menghilangkan rekam jejak aktivitas penyadapan.

NASIONAL

Tak Hanya Listyo Sigit, Said Didu Sebut Ada Pengkhianat yang ‘Menempel’ Prabowo

Oleh Redaksi · 6 Nov, 12.50 WIB



BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Said Didu menduga penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang yang berada dekat dengan presiden. Dugaan itu ia sampaikan dalam dialog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (5/11/2026), tanpa menyebut nama dan tanpa menyertakan bukti.“Yang saya waswas adalah orang yang menempel atau dekat presiden bekerja sama dengan penyadap,” kata Said.

Menurut Said, orang yang bisa berkomunikasi dengan presiden setiap saat sulit dianggap tidak mengetahui penyadapan itu. “Sangat tidak masuk akal apabila orang yang melekat atau bisa berkomunikasi dengan presiden setiap saat itu tidak terlibat,” ujarnya.

Ia menambahkan, orang seperti itu “tidak bisa tidak terlibat”. Alasannya, ia mempertanyakan siapa yang memegang ponsel presiden sehari-hari.

Said juga menduga Prabowo sendiri sudah menyadari ponselnya disadap. Menurutnya, mengetahui hal itu bukan perkara rumit karena teknologinya sederhana. Karena itu ia memperkirakan presiden sudah mengetahui siapa saja yang terlibat, meski penindakan harus tetap berdasarkan hukum.

Dalam wawancara yang sama, Said mengaku mendapat informasi bahwa seorang mantan sekretaris pribadi (sespri) Listyo Sigit Prabowo pernah “dititipkan” kepada Prabowo. Ia menyebut penempatan itu sebagai jebakan, tetapi menurutnya Prabowo tidak memakai orang tersebut.

Ia mengatakan hal yang sama berlaku bagi empat ajudan dari TNI yang disebutnya juga tidak dipakai. Said menilai tingkat kewaspadaan Prabowo “mendekati paranoid”, dan kewaspadaan berlebihan itu menurutnya berisiko membuat presiden keliru menilai siapa yang benar-benar loyal.

Said juga mengaku mendengar bahwa pihak yang diperintah menghancurkan data penyadapan justru melaporkannya. Menurutnya, jika tidak demikian, “mungkin Pak Prabowo hari ini sudah jatuh”.

NASIONAL

Jokowi Serahkan Nasib Perkara Tuduhan Ijazah Palsu ke Hakim

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.43 WIB



Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya proses hukum perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

“Kita serahkan semuanya pada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Saya hanya minta keadilan agar nama baik saya terhadap tuduhan ijazah palsu ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik,” kata Jokowi usai menjalani persidangan sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa Roy Suryo, Kamis, 5 November 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa proses persidangan belum sampai pada tahap putusan pengadilan.

“Ini kan belum pada tahapan nanti keputusan pengadilan. Jadi kita menunggu, sabar menunggu dulu,” kata Jokowi.

Jokowi berharap proses hukum dapat memberikan kepastian atas tuduhan yang selama ini ditujukan kepadanya.

Ia juga berharap perkara tersebut menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah menuduh atau menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik orang lain.

“Saya berharap saya bawa ke ruang sidang pengadilan yang terhormat ini agar menjadi pembelajaran kita semuanya. Jangan mudah menuduh orang, jangan mudah membuat fitnah sehingga mencemarkan nama baik seseorang. Ini untuk pembelajaran kita semuanya,” pungkas Jokowi.

NASIONAL

Ring 1 Istana Diduga Terlibat Kasus Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 6 Nov, 10.21 WIB



BANDA ACEH - Tidak masuk akal apabila kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon seluler (ponsel) Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya sedang diusut oleh Bareskrim Polri hanya melibatkan pihak eksternal tanpa kemungkinan adanya persoalan di lingkungan internal kekuasaan.

Demikian disampaikan Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting di Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis 5 November 2026.

"Menurut saya juga istana harus bersih-bersih diri dari ring satunya,” kata Ginting.

Ginting mempertanyakan siapa yang mengelola ponsel Presiden Prabowo, jaringan penyedia layanan komunikasi yang digunakan, serta bagaimana sistem keamanan komunikasi kepala negara selama ini dijalankan.

“Kira-kira siapa yang memegang handphone-nya Presiden? Provider mana? Apakah yang disadap dari emailnya, dari suara, gelombang, atau lain-lain,” kata Ginting.

Di mata Ginting, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan kecil.

Keamanan komunikasi Presiden merupakan bagian penting dari pertahanan dan perlindungan negara.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka tersebut meliputi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri/ eks Kepala Staf Kepresidenan), Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri), dan Irjen Slamet Uliandi (Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri/ mantan Kabag Monitoring Bareskrim).

ACEH

7 BERITA

ACEH

Pascainsiden di Pidie, Kapolda Aceh Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

Oleh Redaksi · 6 Nov, 23.18 WIB



BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengimbau masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Pidie, agar tetap tenang, menahan diri, dan tidak mudah terpancing emosi menyikapi insiden yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang berkembang. Percayakan penanganan ini kepada TNI dan Polri. Kami juga meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum," kata Ruddi dalam konferensi pers bersama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Pangdam IM Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan Pj. Sekda Aceh Taufik, di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Jumat (6/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh turut menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Abzalul Riza, warga Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu (4/11/) lalu. Ia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

Terkait kondisi para korban, Ruddi menjelaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Aceh telah menjenguk mereka pada Kamis (5/11). Sebanyak 13 orang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Dari jumlah tersebut, 11 orang dirawat di RSU Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dan dua orang lainnya di RSU Tgk. Chik di Tiro Sigli.

"Dari 11 pasien yang dirawat di RSU Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, empat orang telah diperbolehkan pulang, sementara tujuh lainnya masih menjalani perawatan. Kami terus memantau perkembangan kondisi para korban dan memastikan mereka mendapatkan penanganan medis secara optimal," jelasnya.

Lebih lanjut, Ruddi menegaskan bahwa Polda Aceh terus berkoordinasi dengan TNI dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, seluruh langkah penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan, serta mengedepankan pendekatan humanis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh provokasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta memastikan kebenarannya sebelum membagikannya.

Menurutnya, hal ini penting agar insiden tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba dan mengganggu keamanan serta ketertiban di Aceh.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Aceh atas kepedulian dan peran aktifnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Sabang Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah PORA XVI 2030

Oleh Redaksi · 6 Nov, 19.22 WIB



BANDA ACEH – Pemerintah Kota Sabang bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sabang resmi mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) XVI Tahun 2030.

Berkas permohonan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, kepada KONI Aceh di Gedung KONI Aceh, Jumat (6/11/2026) siang.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi Ketua KONI Kota Sabang, Raja Darmawan, dan Plt. Sekretaris Daerah Kota Sabang Rinaldi Syahputra.

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, mengatakan pengajuan tersebut merupakan langkah awal untuk menunjukkan keseriusan Kota Sabang dalam mengambil bagian sebagai tuan rumah salah satu ajang olahraga terbesar di Aceh. Menurutnya, PORA belum pernah diselenggarakan di Sabang sehingga kesempatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi daerah untuk turut berkontribusi dalam penyelenggaraan olahraga tingkat provinsi.

"Kami berharap pencalonan ini bisa mendapat dukungan dan menjadi kesempatan bagi Sabang untuk menjadi tuan rumah PORA XVI 2030. Ini tentu membutuhkan persiapan dan kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, KONI, insan olahraga maupun masyarakat," ujar Zulkifli.

Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah PORA bukan hanya tentang penyelenggaraan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi peluang bagi Sabang untuk mengembangkan potensi atlet, meningkatkan fasilitas olahraga, serta memperkenalkan daerah kepada masyarakat luas.

Zulkifli menambahkan, Sabang memiliki potensi alam yang dapat mendukung penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga. Selain memiliki danau dan waduk yang berpotensi dimanfaatkan untuk olahraga dayung, kondisi geografis Sabang dengan kawasan perairan dan teluk yang relatif terlindung dari gelombang juga menjadi salah satu potensi untuk mendukung kegiatan olahraga bahari.

"Kita memiliki potensi alam yang bisa mendukung kegiatan olahraga. Harapannya, jika Sabang dipercaya menjadi tuan rumah PORA, potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Di sisi lain, penyelenggaraan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan sport tourism, sehingga tidak hanya mendorong kemajuan olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian masyarakat," tutupnya.[]

ACEH

Wali Nanggroe Serukan Pengusutan Transparan dan Dialog Bermartabat Pascainsiden Pidie

Oleh Redaksi · 6 Nov, 20.11 WIB



BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menyerukan pengusutan secara menyeluruh dan transparan terhadap insiden yang terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, saat aparat keamanan melakukan penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam kegiatan kenduri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (4/11/2026).

Insiden yang berlangsung di Meunasah Gampong Pulo Keunari tersebut mengakibatkan meninggalnya Abzalul Rizal (20), warga Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, serta menyebabkan sejumlah warga dan personel TNI mengalami luka-luka.

Menanggapi peristiwa tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban sekaligus menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum dan dialog yang bermartabat demi menjaga perdamaian Aceh.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama pribadi dan Lembaga Wali Nanggroe, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala kesalahannya, serta memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Wali Nanggroe, Jumat (6/11/2026).

Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, selain menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Rizal, Wali Nanggroe juga menyatakan keprihatinannya terhadap belasan warga yang mengalami luka-luka, termasuk perempuan dan seorang anak, serta sejumlah personel TNI yang turut menjadi korban dalam insiden tersebut.

Sebagian korban dilaporkan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan, seorang korban harus dirujuk ke Banda Aceh akibat mengalami luka di bagian kepala.

Wali Nanggroe berharap seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik hingga pulih sepenuhnya. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang telah menjenguk para korban serta mendengarkan secara langsung aspirasi keluarga mereka.

Pengusutan Menyeluruh dan Transparan

Wali Nanggroe menegaskan bahwa hilangnya nyawa seseorang serta terlukanya warga maupun aparat keamanan merupakan peristiwa serius yang harus ditangani secara hati-hati, objektif, dan berlandaskan hukum.

Karena itu, ia mendukung dilakukannya pengusutan secara menyeluruh, transparan, dan dapat dipercaya guna mengungkap kronologi kejadian, penyebab kematian korban, penggunaan kekuatan oleh aparat di lapangan, serta pertanggungjawaban setiap pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tidak boleh ada kesimpulan yang dibangun hanya berdasarkan potongan informasi ataupun kepentingan tertentu. Fakta harus dibuka secara terang dan keadilan harus diberikan kepada semua pihak,” tegasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kak Na Gaungkan Gerakan Menanam Sayur di Gampong

Oleh Aceh Barat · 6 Nov, 21.25 WIB



Semangat kebersamaan ibu-ibu saat memanen berbagai sayuran segar hasil kebun sendiri.

MEULABOH – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh, Marlina Usman atau akrab disapa Kak Na, mendorong setiap gampong di Aceh mengembangkan kebun sayur sebagai upaya membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Pesan tersebut disampaikan Kak Na saat melakukan pembinaan Gampong Mawaddah Warrahmah (Gammawar) di Desa Cot Jurumudi, Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat, Jumat (6/11/2026). Kegiatan itu turut didampingi Ketua TP PKK Aceh Barat, Afrinda Novalia.

Dalam kunjungan tersebut, Kak Na bersama rombongan turut meninjau kebun TP PKK Desa Cot Jurumudi. Ia menegaskan, keberadaan kebun sayur di setiap gampong merupakan bagian dari program kerja Kelompok Kerja (Pokja) III TP PKK.

Menurutnya, pemanfaatan lahan untuk menanam sayuran dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus menekan biaya belanja rumah tangga. Ia juga mengajak para suami untuk ikut mendukung kegiatan berkebun bersama keluarga.

"Kami berharap setiap gampong di Aceh, bukan hanya di Aceh Barat, memiliki tanaman sayur-sayuran. Ini menjadi salah satu upaya membantu mengurangi pengeluaran ekonomi rumah tangga," ujar Kak Na.

Pada kesempatan itu, Kak Na juga menyerahkan bantuan perlengkapan rumah tangga kepada Ketua TP PKK Aceh Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada TP PKK Gampong Cot Jurumudi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Barat, Cut Zulfahnur Syafitri, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Pemkab Aceh Besar Gelar Retret bagi 234 Keuchik, Perkuat Kepemimpinan Gampong

Oleh Redaksi · 6 Nov, 19.50 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan menggelar kegiatan retret bagi para keuchik sebagai upaya memperkuat kapasitas dan integritas kepemimpinan pemerintahan gampong.

Kegiatan tersebut merupakan gagasan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil setelah keduanya mengikuti retret kepala daerah tingkat nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Jakfar, SP., M.Si., mengatakan, gagasan pelaksanaan retret bagi para keuchik berangkat dari pengalaman Bupati dan Wakil Bupati saat mengikuti kegiatan serupa di tingkat nasional.

Menurutnya, keduanya menilai kegiatan retret memiliki manfaat besar dalam memberikan pembekalan, menyelaraskan visi, serta memperkuat kepemimpinan. Karena itu, pengalaman tersebut ingin diterapkan di lingkungan pemerintahan gampong di Aceh Besar.

"Bapak Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dan Bapak Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil termasuk kepala daerah yang berkesempatan mengikuti kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia. Berawal dari pengalaman kegiatan beliau berdua dan menganggap kegiatan retret seperti ini sangat bermanfaat bila dapat dilaksanakan di Aceh Besar. Bupati Aceh Besar yang akrab disapa Syech Muharram ini menggagas program spektakuler ini, yakni menyelenggarakan kegiatan retret bagi para keuchik di Aceh Besar," ujarnya di Kota Jantho, Jumat (6/11/2026).

Jakfar menjelaskan, kegiatan tersebut mengusung tema "Memperkuat Kepemimpinan Keuchik untuk Mewujudkan Pemerintahan Gampong yang Profesional, Akuntabel, Responsif, Mandiri, dan Berdaya Saing."

Selain tujuan utama tersebut, retret diharapkan menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran informasi pembangunan antarpimpinan pemerintahan gampong.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan program pembangunan yang dilaksanakan para keuchik di gampong masing-masing, sekaligus memperkuat integritas kepemimpinan di tingkat gampong.

"Keuchik sebagai pimpinan pemerintahan di gampong merupakan perpanjangan tangan sekaligus pelaksana kebijakan dan pembangunan pemerintah kabupaten yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin memperkuat kepemimpinan keuchik untuk mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, akuntabel, responsif, mandiri, dan berdaya saing," jelasnya.

Oleh karena itu, Pemkab Aceh Besar melalui DPMG memandang penting memberikan pembekalan kepada para keuchik. Melalui retret tersebut, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah kabupaten, sehingga program pembangunan dapat berjalan selaras di setiap gampong.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pakai Cadar Saat Beraksi, Pria Pencuri HP Ditangkap Polisi

Oleh Aceh Barat · 6 Nov, 11.15 WIB



Tiga buah ponsel pintar dan pakaian berwarna gelap yang ditemukan di lokasi.

MEULABOH – Seorang pria berinisial S (34) ditangkap Unit Resmob Satreskrim Polres Aceh Barat setelah diduga mencuri sejumlah telepon genggam dan dompet di Rumah Sakit Swasta Harapan Sehat, Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Pelaku ditangkap pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah gudang di Jalan Generasi, Desa Gampa. Saat beraksi, pelaku diduga menyamar menggunakan pakaian perempuan dan cadar untuk mengelabui orang-orang di sekitar lokasi.

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi mengatakan, penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan dugaan pencurian yang diterima polisi pada 2 November 2026.

Peristiwa pencurian terjadi pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 19.15 WIB. Korban kehilangan dua unit telepon genggam dan satu dompet. Selain itu, satu unit telepon genggam milik rekan kerja korban juga dilaporkan hilang.

Kecurigaan mengarah kepada seseorang yang terlihat mengenakan pakaian perempuan dan cadar di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut menjadi salah satu petunjuk bagi polisi untuk melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap terduga pelaku.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan tiga unit telepon genggam, satu dompet berisi kartu identitas dan kartu ATM, serta satu kotak ponsel merek ZTE Blade A35 yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, S mengakui perbuatannya. Akibat kejadian itu, korban ditaksir mengalami kerugian materiil sekitar Rp5 juta.

Saat ini, terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Aceh Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti guna proses hukum selanjutnya.

Atas dugaan perbuatannya, S disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf e juncto Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

AKBP Budi Darma Gagas Strategi Mitigasi Narkoba Berbasis Partisipasi Masyarakat

Oleh Redaksi · 6 Nov, 12.12 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar penegakan hukum. Keterlibatan aktif masyarakat, penguatan ketahanan lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, AKBP Budi Darma, S.H., yang menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Aceh, menggagas strategi mitigasi penanganan narkoba berbasis partisipasi masyarakat melalui penguatan Program Gampong Bebas Narkoba (GBN).

Gagasan tersebut dituangkan Budi Darma ke dalam Proyek Perubahan (Proper) sebagai bagian dari Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Proyek perubahan ini mengusung tema “Strategi Mitigasi Penanganan Narkoba Berbasis Partisipatif di Wilayah Hukum Polda Aceh”.

 Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik fotoMenurut Budi Darma, persoalan narkoba merupakan ancaman kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penindakan terhadap pelaku. Diperlukan strategi yang mampu menyentuh akar persoalan melalui mitigasi risiko, edukasi, pemberdayaan, penguatan ketahanan keluarga dan sosial, serta keterlibatan masyarakat sejak dini.

Ia memandang bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian utama dari solusi, bukan sekadar objek sosialisasi atau penerima program pencegahan. Sementara itu, Polri berperan sebagai penggerak, fasilitator, dan pengoordinasi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu instrumen utama yang dikembangkan dalam gagasan tersebut adalah Program Gampong Bebas Narkoba. Program ini diarahkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi ancaman narkoba, memetakan risiko di lingkungan masing-masing, membangun kepedulian bersama, serta melakukan langkah pencegahan secara terencana dan berkelanjutan.

 Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik fotoDalam implementasinya, Budi mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, mulai dari belum optimalnya sinergi antar-stakeholder, koordinasi yang masih berjalan secara sektoral, belum seragamnya mekanisme pelaksanaan, hingga keterlibatan masyarakat yang belum maksimal sebagai pelaku utama pencegahan.

Karena itu, strategi perubahan ini dirancang untuk membangun pola penanganan yang lebih terintegrasi, dari pendekatan yang selama ini cenderung berorientasi pada penegakan hukum dan penanganan kasus menuju mitigasi berbasis risiko dengan mengedepankan pencegahan dan partisipasi masyarakat.

Penguatan Gampong Bebas Narkoba juga diarahkan melalui keterlibatan berbagai unsur, antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, pemerintah gampong, TNI, Kejaksaan, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, PKK, serta relawan antinarkoba.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

8 BERITA

INTERNASIONAL

Krisis Bank Digital Guncang Paraguay, Jutaan Warga Tak Bisa Tarik Uang

Oleh Van · 6 Nov, 20.54 WIB



Krisis ekonomi di Paraguay memicu kekacauan massal di jalanan karena warga kesulitan menarik uang tunai.

ASUNCIÓN – Paraguay diguncang krisis perbankan serius setelah Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan digital terbesar di negara Amerika Selatan tersebut, dihentikan operasionalnya oleh Bank Sentral Paraguay.

Keputusan itu membuat jutaan nasabah kehilangan akses sementara terhadap tabungan mereka, memicu kepanikan, antrean panjang di kantor bank, hingga demonstrasi yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan.

Situasi semakin memanas setelah masyarakat turun ke jalan menuntut pengembalian uang mereka. Sejumlah demonstran bahkan membakar simbol Presiden Santiago Peña di sekitar gedung Kongres. Aparat kepolisian dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang mendesak pemerintah bertanggung jawab atas krisis tersebut.

Berdasarkan laporan Associated Press (AP) yang diterbitkan 3 November 2026 dan diperbarui dalam pemberitaan internasional pada 5–6 November 2026, Ueno Bank memiliki sekitar tiga juta nasabah atau setara dengan 60 persen penduduk dewasa Paraguay. Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya dampak ketika lembaga keuangan itu tiba-tiba tidak dapat menjalankan pelayanan normal.

Persoalan bermula ketika Bank Sentral Paraguay menemukan masalah serius pada kondisi permodalan Ueno Bank. Rasio solvabilitas bank tersebut dilaporkan merosot hingga berada di bawah separuh ambang batas minimum yang diwajibkan oleh regulasi. Otoritas kemudian mengambil alih pengelolaan bank untuk mengamankan aset dan mengupayakan perlindungan terhadap para deposan.

Pemeriksaan regulator juga mengungkap dugaan penyaluran kredit berlebihan kepada sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemegang kendali Ueno Bank, Grupo Vázquez.

Selain itu, penyidik menyoroti dugaan pencatatan sejumlah pengeluaran secara tidak semestinya sebagai aset perusahaan.

Krisis tersebut bukan hanya menyangkut simpanan masyarakat. Ueno Bank dilaporkan mengelola dana publik sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS, termasuk sekitar 380 juta dolar AS yang berasal dari dana pensiun dan kesehatan negara. Kondisi ini memperluas persoalan menjadi perkara serius yang menyangkut pengelolaan keuangan publik dan pengawasan perbankan.

Dampak penutupan layanan langsung dirasakan masyarakat. Nasabah tidak dapat mengakses aplikasi perbankan, melakukan transfer, maupun menarik uang seperti biasanya.

Sejumlah warga mendatangi kantor-kantor cabang untuk meminta kepastian mengenai nasib tabungan mereka, sementara aparat berjaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi kericuhan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, otoritas Paraguay menyatakan bahwa sebagian besar simpanan nasabah memiliki perlindungan melalui skema penjaminan deposito.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

PSI Unggah Foto Jokowi Ambil Map, Pangi Syarwi: Jualan si Paling Terdzalimi Paling Laku di Indonesia

Oleh Redaksi · 6 Nov, 17.54 WIB



BANDA ACEH - Unggahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengambil map dokumen yang terjatuh saat menjadi saksi dalam sidang dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menuai tanggapan dari Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago.Melalui akun media sosialnya, PSI membagikan foto Jokowi yang terlihat membungkuk untuk mengambil dan merapikan map dokumen di lantai. Momen tersebut terjadi saat Jokowi memberikan kesaksian di PN Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026).

PSI menyebut sikap Jokowi selama persidangan menunjukkan ketertiban dan penghormatan terhadap proses hukum.

"Siapa yang tidak trenyuh melihat adegan ini? Pak Jokowi membungkuk untuk mengambil dan merapikan map dokumen saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Beliau menjalani proses persidangan dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap hukum. Tidak ada kesan jumawa sama sekali," tulis PSI.

Menanggapi unggahan tersebut, Pangi menilai narasi yang membangun empati melalui momen kesedihan atau kesan sebagai pihak yang terzalimi mudah mendapat respons masyarakat.

"Jualan kesedihan terzalimi paling laku di Indonesia. Lagi ramai nangisin si Jack ngambilin map di lantai. Bagi masyarakat awam bisa netes air matanya," kata Pangi.

Ia kemudian melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Pangi menilai masyarakat mudah menunjukkan empati kepada mantan pemimpin, meskipun menurutnya masih ada persoalan dan pengalaman selama masa pemerintahan yang perlu diingat.

"Ramai-ramai empati, padahal sudah buat hidup lu tersiksa menderita, ugal-ugalan mengurus negara selama 10 tahun. Bangsa pelupa dan pemaaf. Tapi rakyatnya paling dermawan dan baik sama pemimpinnya," ujarnya.

Pangi juga menyinggung isu Politik identitas yang menurutnya menjadi salah satu persoalan pada era pemerintahan Jokowi.

"Oh iya, jangan lupa di era si Jack kita dibenturkan politik identitas," tambahnya.

Pernyataan Pangi tersebut merupakan tanggapan dan penilaian pribadinya terhadap unggahan PSI serta rekam jejak pemerintahan Jokowi.

EKONOMI

Sempat Menguat Sehari Sebelumnya, IHSG Justru Dibuka Anjlok pada Jumat 6 November

Oleh Van · 6 Nov, 16.29 WIB



Layar bursa saham yang memerah menandakan tren penurunan harga di pasar modal.

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 6 November 2026. Pada pukul 09.02 WIB, indeks turun 74,43 poin atau 1,48 persen ke level 4.955,83.

Pelemahan ini terjadi setelah IHSG menutup perdagangan Kamis, 5 November 2026, dengan penguatan 2,25 persen ke posisi 5.030,26.

Pada awal perdagangan Jumat, volume transaksi tercatat 19,28 juta lot dengan nilai sekitar Rp387,79 miliar. Pergerakan pasar masih perlu dipantau karena sesi pertama belum berakhir.

IHSG Dibuka Merah Setelah Menguat Sehari Sebelumnya

Penurunan IHSG pada awal perdagangan menunjukkan pasar belum mampu mempertahankan momentum penguatan sehari sebelumnya. Investor masih mencermati perkembangan pasar global dan sejumlah agenda ekonomi.

Pada perdagangan Kamis, sebanyak 440 saham menguat, 178 saham melemah, dan 99 saham bergerak stagnan. Saham BAJA, BELL, MKNT, UVCR, dan MSKY masuk jajaran top gainers pada penutupan hari tersebut.

Namun, daftar saham yang menguat pada Kamis tidak dapat dianggap sebagai top gainers perdagangan Jumat. Data individual saham pada pembukaan Jumat belum tersedia dalam laporan awal yang menjadi acuan artikel ini.

Wall Street dan Saham Teknologi Jadi Perhatian

Salah satu sentimen eksternal yang membayangi pasar adalah pelemahan bursa Amerika Serikat, terutama saham-saham teknologi. Pergerakan Wall Street menjadi perhatian investor karena dapat memengaruhi selera risiko di pasar saham global.

Perkembangan politik Amerika Serikat setelah pemilu sela juga menjadi perhatian. Perubahan peta kekuatan politik di Kongres memunculkan spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintahan Donald Trump, termasuk konflik di Timur Tengah.

Harga minyak dunia yang sebelumnya mengalami penurunan tajam turut menjadi faktor yang dicermati pelaku pasar. Perubahan harga komoditas dapat memengaruhi saham-saham sektor energi dan barang baku.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Penopang

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2026 menjadi salah satu kabar positif. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 5,29 persen.

Capaian tersebut berpotensi memperkuat optimisme terhadap aktivitas ekonomi domestik. Namun, sentimen positif itu belum cukup menahan tekanan jual pada pembukaan perdagangan Jumat.

Investor juga mencermati perkembangan reformasi pasar modal dan kebijakan regulator. Langkah pengawasan serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran di pasar saham menjadi perhatian setelah muncul kekhawatiran terkait transparansi pasar.

Saham Apa yang Perlu Dipantau?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Detik-detik Erupsi Dua Gunung di Jawa Timur dalam Sehari: Semeru Pagi Hari dan Sore Disusul Bromo

Oleh Van · 6 Nov, 15.15 WIB



Pemandangan mengerikan sekaligus menakjubkan dari letusan gunung berapi yang memuntahkan awan panas.

JAWA TIMUR — Gunung Bromo dan Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi dalam waktu berdekatan.

Gunung Bromo yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, erupsi pada Kamis, 5 November 2026 sore.

Letusan tersebut menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 500 meter di atas puncak kawah. Masyarakat dan wisatawan di kawasan Gunung Bromo diminta meningkatkan kewaspadaan.

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api Bromo, erupsi terjadi pada pukul 17.11 WIB dan kolom letusan teramati mencapai ketinggian 2.829 meter di atas permukaan laut (mdpl).

"Terjadi erupsi Gunung Bromo pada hari Kamis pukul 17.11 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 2.829 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Bromo, Budi Marwanto dalam keterangannya kepada awak media pada Kamis, 5 November 2026.

Budi menjelaskan bahwa kolom abu vulkanik yang keluar dari kawah berwarna kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal.

Erupsi tersebut juga terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi sekitar 46 detik, serta abu vulkanik terpantau bergerak ke arah barat mengikuti arah angin.

Status Gunung Bromo Masih Level II Waspada

Meski mengalami erupsi, status aktivitas vulkanik Gunung Bromo masih berada pada Level II atau Waspada.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga mengeluarkan imbauan mengenai jarak aman untuk masyarakat di sekitar Gunung Bromo.

"Masyarakat dan pengunjung atau wisatawan, serta pendaki tidak memasuki kawasan dalam radius 1 kilometer dari kawah aktif Gunung Bromo," tulis dalam keterangan resmi PVMBG pada Jumat, 6 November 2026.

Imbauan tersebut mengingatkan masyarakat yang banyak beraktivitas di sekitar Gunung Bromo mengenai kemungkinan letusan freatik.

Pasalnya, letusan tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului gejala vulkanik yang jelas.

Erupsi Gunung Semeru

Sementara itu, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi pada Kamis, 5 November 2026 pagi dengan mengeluarkan awan panas guguran (APG) sejauh 4.500 meter

Erupsi di Gunung Semeru sendiri terjadi pada pukul 09.24 WIB dengan disertai kolom abu vulkanik tebal yang membubung hingga 700 meter di atas puncak kawah atau mencapai ketinggian sekitar 4.376 meter di atas permukaan laut.

Mengenai statusnya, saat ini Gunung Semeru berada di Level III atau Siaga.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

BISNIS

Menteri MOTIR Promosikan Produk Konsumen Korea kepada Pembeli Global di K-Sale Festa

Oleh Redaksi · 6 Nov, 14.56 WIB



Menteri Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea (MOTIR), Jung-Kwan Kim, mengunjungi sejumlah gerai peserta K-Sale Festa di kawasan Hongdae, Seoul, pada 2 November 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mempromosikan festival belanja itu sekaligus memperkenalkan produk konsumen Korea.K-Sale Festa merupakan bagian dari Korea Grand Festival, festival belanja berskala nasional di Korea Selatan. Ajang ini mempertemukan peritel daring dan luring—mulai dari hipermarket, department store, minimarket, hingga platform belanja online—serta produsen otomotif, peralatan rumah tangga, dan penyedia jasa untuk menghadirkan program diskon besar-besaran. Tahun ini, jangkauan festival untuk pertama kalinya diperluas ke konsumen luar negeri melalui promosi khusus yang melibatkan sejumlah perusahaan terkemuka penjual produk Korea secara langsung kepada pembeli internasional melalui internet.

Dalam kunjungannya, Menteri Kim mendatangi gerai MUSINSA dan OLIVE YOUNG yang turut berpartisipasi dalam promosi perdagangan elektronik lintas negara. Ia membeli sejumlah produk Korea, ikut mempromosikan penjualannya, dan berbincang dengan pengunjung mancanegara. Menteri Kim mendengarkan pandangan mereka mengenai produk Korea serta kendala yang dihadapi saat berbelanja, termasuk kekhawatiran terhadap barang palsu. Ia juga menjelaskan cara membeli produk Korea dengan lebih mudah melalui situs resmi promosi belanja lintas negara tersebut.

“Produk manufaktur Korea, termasuk produk K-beauty dan K-fashion, semakin menjangkau pasar luar negeri melalui berbagai platform ritel,” ujar Menteri Kim. “Pemerintah akan terus memperkuat dukungan agar produk konsumen Korea dapat memasuki lebih banyak pasar di seluruh dunia.”Pada hari yang sama, acara promosi K-Sale Festa digelar di Hongdae Meeting Square. Para kreator konten dari lima kawasan metropolitan besar dan tiga provinsi berstatus otonomi khusus di Korea Selatan—yang dikenal dalam kebijakan pembangunan wilayah sebagai skema “5 kutub dan 3 wilayah khusus”—hadir sebagai pendukung festival. Dalam sesi bincang-bincang, pimpinan perusahaan ritel besar serta perusahaan ritel kecil dan menengah bergabung dengan koki ternama serta para kreator konten untuk memperkenalkan beragam penawaran diskon selama K-Sale Festa.

Acara tersebut menyoroti program diskon utama yang telah berlangsung sejak pembukaan K-Sale Festa pada 29 Oktober di hipermarket, department store, platform belanja online, dan minimarket. Selain itu, dipaparkan pula promosi dari produsen mobil dan peralatan rumah tangga yang dimulai pada 1 November. Lima produsen mobil menawarkan potongan harga untuk sejumlah model populer, termasuk sedan kelas menengah dan SUV.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Siap-siap! Mensesneg Umumkan Rekrutmen CPNS Dibuka pada November 2026

Oleh Redaksi · 6 Nov, 15.39 WIB



BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada akhir 2026. "Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).Menurut dia, pembukaan rekrutmen CPNS dalam rangka penyegaran komposisi PNS menyusul pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Selain itu, program-program prioritas pemerintah juga membutuhkan PNS.

Prasetyo menjelaskan, seleksi tersebut rencananya akan dibuka pada November 2026. Adapun detail informasi terkait seleksi akan disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam waktu dekat.

"Bagi adik-adik kita, perlu kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," kata Prasetyo.

Pengangkatan PPPK

Prasetyo menyampaikan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sektor tenaga teknis dan pelaksana lainnya lintas profesi paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu. Dia mengumumkan kebijakan itu dalam jumpa pers usai rapat koordinasi pemerintah dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain," kata Prasetyo.

Dia menyebut, kebijakan itu menyusul keputusan pemerintah yang sebelumnya akan mengangkat PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Prasetyo menyampaikan, para PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Dalam hal seleksi CPNS itu, Prasetyo menyebut, pemerintah akan memberlakukan perlakuan khusus, terutama yang berkaitan dengan masalah batasan usia. Untuk posisi tertentu, batasan usia akan dilonggarkan.

"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," ucapnya.

LINGKUNGAN

Bak Siluman, Satgas PKH Tiba di Jambi dan Langsung Tertibkan Tambang Emas Ilegal di TNKS

Oleh Redaksi · 6 Nov, 14.11 WIB



Operasi mendadak digelar di Kabupaten Kerinci dan Merangin. Seluas 119,32 hektare kawasan teridentifikasi terdampak, sementara jaringan pelaku hingga pihak yang diduga menjadi backing tambang ilegal masuk radar penindakan.

BANDA ACEH, JAMBI – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bergerak cepat setibanya di Provinsi Jambi. Tanpa banyak publikasi, tim langsung menggelar operasi penertiban aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), khususnya di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan RI, agar seluruh aktivitas ilegal di kawasan hutan ditertibkan secara tegas, terpadu, dan tuntas.

Berdasarkan analisis geospasial, kawasan terdampak pertambangan ilegal di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, mencapai 119,32 hektare.

Satgas PKH bergerak serentak di tiga lokasi, yakni Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Operasi tersebut melibatkan Satgas PKH bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta unsur pemerhati lingkungan hidup.

Polda Jambi dan Kejati Jambi juga menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan pertambangan ilegal.

Jaringan Pelaku Teridentifikasi, Pihak yang Diduga Menjadi Backing Masuk Radar

Satgas PKH bersama unsur terkait telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Mereka terdiri atas pelaku lapangan, aktor pendukung, pemasok bahan bakar minyak (BBM), hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap kegiatan tersebut.

Penelusuran terus dikembangkan untuk mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti membiayai, mengendalikan, memfasilitasi, atau melindungi aktivitas ilegal.

Penindakan tidak hanya menyasar pekerja tambang. Pihak lain yang terbukti terlibat dalam kegiatan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum.

Selain menelusuri jaringan pelaku, Satgas PKH juga mencari keberadaan alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal. Tim turut memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Para pelaku berpotensi dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perusakan Hutan, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Konservasi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta ketentuan pidana lainnya sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.

Operasi Berlanjut hingga Seluruh Aktivitas Ilegal Ditertibkan

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Generasi Muslim di Tengah Gempuran Media

Oleh Lulu Nugroho · 6 Nov, 10.50 WIB



Gambar ini menampilkan seorang siswa dengan pakaian muslimah berwarna marun yang sedang fokus menulis di meja kelas. Di atas meja terdapat buku pelajaran bertajuk 'Islamic

AAT ini generasi muda berusaha keras bertahan di tengah berbagai persoalan yang berkelindan di tengah kehidupan.

Tidak mudah memang. Apalagi bagi Gen Z yang hidup di dua alam, dunia maya dan nyata.

Mereka tak pernah lepas berselancar di media sosial, agar tak ketinggalan info untuk berkomunikasi dengan siapapun.

Mereka takut ketinggalan isu terbaru, dan tidak mau disebut kudet atau kurang update.

Celakanya, paparan konten media sosial yang berlebihan justru rentan memicu depresi di kalangan anak muda.

Saat mereka larut di dunia maya, nilai-nilai yang ada di sana pun akan mereka serap.

Tak peduli benar atau salah, baik atau buruk, apabila ditampilkan oleh pesohor negeri, maka itu dianggap layak untuk diikuti.

Mereka terperangkap dalam FOMO (Fear of Missing Out) dan menjadi people pleasure (tidak enakan) demi bisa diterima di lingkungan pertemanan, yang ujung-ujungnya malah membuat mereka bingung tanpa arah, hingga mengikis kepribadian mereka.

Sudut pandang, perspektif atau pov (point of view) mereka telah dipengaruhi gaya hidup kekinian.

Sementara di usia belia mereka masih mencari-cari jati diri.

Mereka belum memiliki bentuk yang jelas tentang diri mereka sendiri.

Mereka pun gamang berpijak pada setiap kondisi dan mudah terbawa arus.

Akibatnya, media laksana ibu asuh yang membesarkan mereka yang membentuk membentuk pov sekuler kapitalistik di kalangan anak muda, yang tanpa sadar menjadikan mereka sebagai target pasar kapitalisme global dan terus menyeret remaja pada budaya materialistik, konsumtif dan liberal.

Akibatnya, tak hanya soal konsumsi, mereka pun akhirnya terpapar konten kekerasan, sehingga membawa mereka pada kasus-kasus kriminalitas.

Siswa bersenjata tajam, tawuran, geng motor, perundungan, dan sebagainya, pun dilakukan demi konten.

Mereka tak punya pemahaman yang benar tentang sikap baik yang harusnya melekat pada kepribadian mereka

Tren Tandingan

Namun tak kalah menariknya, terdapat tren soft life dan digital wellness di kalangan mereka, dengan melakukan digital detox (puasa medsos) atau ikutan program konseling remaja di sekolah lewat Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) demi menjaga kewarasan.

Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi keterikatan terhadap gawai.

Pasalnya, Gen Z rata-rata menghabiskan waktu sekitar 6 hingga 9 jam per hari untuk menatap layar ponsel (screen time).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin